

EDISI REVISI



**SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI
GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2015**

**BUKU 1
PEDOMAN PENETAPAN PESERTA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2015**

PEDOMAN SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015
- Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015
- Buku 3 Pedoman Penyusunan dan Penilaian Rekognisi Pembelajaran Lampau

Tim Penyusun

Dr. Unifah Rosyidi. (Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik)
Dra. Santi Ambarukmi, M.Ed. (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik Dikmen)
Suharno M Sajim SE, M.Si. (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik PAUDNI)
Dian Wahyuni, SH, MA (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik Dikdas)
Antoni Sitanggang, MM (Kasubbid Sertifikasi Pengembangan Profesi Pendidik Dikdas)
Putra Asga Elevri, M.Si (Kasubbid Sertifikasi Pengembangan Profesi Pendidik Dikmen)
Alex Arifiansyah (Pusat Pengembangan Profesi Pendidik)
Prof. Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Universitas Negeri Yoyakarta)
Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Prof. Dr. rer.nat Sajidan, M.Si (Universitas Sebelas Maret)
Drs. Suyud, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. rer.nat Adi Rahmat, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Soeprijanto (Universitas Negeri Jakarta)
Dr. rer.nat Omay Sumarna, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Das Salirawati, M.Si. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Ir. Bambang Parikesit, M.Ed

Copyright © 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa ijin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Implementasi dari amanat tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 melalui beberapa pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Tahun 2009 dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan program S-1 Kependidikan dan Non Kependidikan, dan tahun 2011 dilaksanakan Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2015, perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ). Sertifikasi guru melalui PPGJ tersebut menggunakan pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang melandasi pelaksanaan PPG.

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut.

Pedoman ini perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru melalui PPGJ di pusat dan di daerah. Unsur pusat yaitu Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Unsur daerah yaitu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kepala sekolah, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru, serta unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

Terimakasih kepada Tim sertifikasi guru Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK-PMP) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ ini.

Jakarta, Desember 2014

Kepala BPSDMP-PMP,



Syawal Gultom

NIP. 19620203 198703 1 002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR DAN TABEL | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN | 11 |
| A. Latar Belakang | 11 |
| B. Dasar Hukum | 13 |
| C. Tujuan | 14 |
| D. Sasaran | 14 |
| E. Ruang Lingkup Pedoman | 15 |
| BAB II. SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN | 17 |
| A. Alur Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan..... | 17 |
| B. Prinsip Sertifikasi Guru Melalui PPGJ..... | 20 |
| BAB III. PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015 | 23 |
| A. Sasaran | 23 |
| B. Persyaratan Peserta..... | 23 |
| C. Penetapan Peserta..... | 25 |
| D. Penetapan Bidang Studi..... | 28 |
| E. Penomoran Peserta | 29 |
| BAB IV. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI MELALUI PPGJ TAHUN 2015 | 31 |
| A. Tahap Persiapan dan Sosialisasi | 31 |
| B. Tahap Seleksi dan Penetapan Peserta | 36 |
| C. Tahap Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen RPL..... | 43 |
| D. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui PPGJ Tahun 2015 | 45 |
| BAB V. PENGENDALIAN PROGRAM | 47 |
| A. Ruang Lingkup Pengendalian..... | 47 |
| B. Pemantauan Program..... | 47 |
| C. Unit Pelayanan Masyarakat..... | 48 |

| | |
|---|-----------|
| LAMPIRAN | 49 |
| Lampiran 1 | 50 |
| Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi | 50 |
| Lampiran 2 | 56 |
| Kode Bidang Studi Sertifikasi | 56 |
| Lampiran 3 | 64 |
| Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota | 64 |
| Lampiran 4 | 79 |
| Contoh Format A1 | 79 |
| Lampiran 5 | 80 |
| Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas | 80 |
| Lampiran 6 | 82 |
| Format Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen | 82 |
| Lampiran 7 | 83 |
| Jadwal Kegiatan | 83 |

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

| | Halaman | |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Alur Sertifikasi Guru melalui PPGJ | 17 |
| Gambar 3.1 | Nomor Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ | 30 |
| Tabel 4.3 | Dokumen RPL Sertifikasi Guru melalui PPGJ | 43 |
| Gambar 4.1 | Tahapan Prosedur Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ Tahun 2015 | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut UUGD mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran

Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru dalam jabatan setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru

dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, maka perbaikan pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

UUGD menegaskan bahwa sertifikasi untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat sebelum UUGD disahkan, 30 Desember 2005, harus sudah selesai pada tahun 2015. Selain sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui pola yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan, sejak tahun 2011 guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui pola yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan. Pasal 10 peraturan tersebut menegaskan bahwa guru mengikuti program PPG dengan beban belajar 36 SKS dan sesuai dengan latar belakang pendidikan/keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.

Pada akhir tahun 2014, berdasarkan data guru pada sistem NUPTK, masih ada sekitar 500 ribu guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pada umumnya guru-guru tersebut diangkat menjadi guru setelah Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan tersebut akan menggunakan standar beban belajar sesuai Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan, bahwa guru harus meninggalkan kelas/pembelajaran selama 2 semester untuk menempuh beban belajar 36 SKS. Dengan mempertimbangkan bahwa guru dalam jabatan tidak diperkenankan meninggalkan tugas mengajar selama mengikuti sertifikasi guru, maka pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan mengalami beberapa penyesuaian tanpa mengurangi kualitas lulusan. Penyesuaian yang dimaksud yaitu rekognisi pembelajaran lampau (RPL), durasi *workshop*/pelatihan di LPTK dimampatkan hingga hanya 16 hari, dan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah selama 2 (dua) bulan, ujian akhir dilaksanakan di sekolah.

Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2015 dimulai dengan pembentukan panitia sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pendataan peserta dan penetapan peserta. Agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2015.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Konselor/Pendidikan Profesi Konselor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
11. Permennegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Pengembangan RPL);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Pengembangan RPL);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 87 tahun 2013 tentang program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

C. Tujuan

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 di wilayahnya.

D. Sasaran

Sasaran pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Tahun 2015;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Pengawas Sekolah;
6. Kepala Sekolah;

7. Guru; dan;
8. Masyarakat.

E. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tentang beberapa hal sebagai berikut.

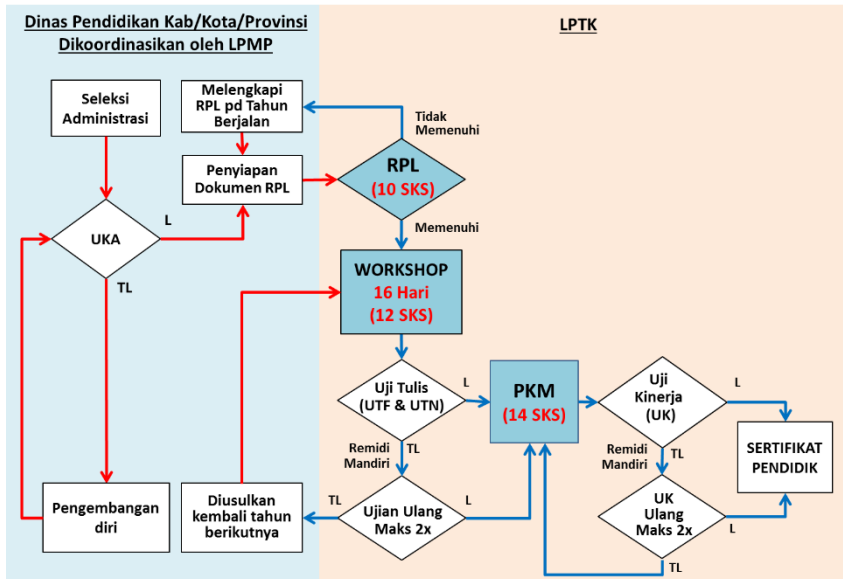
1. Alur sertifikasi guru
2. Sasaran peserta sertifikasi guru
3. Persyaratan peserta sertifikasi guru
4. Proses penetapan peserta sertifikasi guru
5. Prosedur operasional standar sertifikasi guru
6. Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru

BAB II

SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

A. Alur Sertifikasi Guru melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

Sertifikasi guru tahun 2015 dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) yang selanjutnya disebut **sertifikasi guru melalui PPGJ**. Alur pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Alur Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Penjelasan alur sertifikasi guru melalui PPGJ yang disajikan pada Gambar 2.1 adalah sebagai berikut.

1. Guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ mengikuti seleksi administrasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

2. Semua guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah memenuhi persyaratan administrasi diikutkan dalam seleksi akademik berbasis data hasil Uji Kompetensi (UKA dan UKG).
3. Bagi peserta yang lulus seleksi akademik dilanjutkan dengan penyusunan RPL.
4. Bagi guru yang telah memiliki RPL setara dengan 10 SKS atau lebih ditetapkan sebagai peserta *workshop* di LPTK. Sedangkan guru yang sudah mencapai sekurang-kurangnya 7 SKS dapat melengkapi kekurangan RPL tersebut dengan durasi waktu maksimal 20 hari sejak diumumkan.
5. *Workshop* dilaksanakan selama 16 hari (168 JP) di LPTK meliputi kegiatan pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/Penelitian Tindakan layanan Bimbingan dan Konseling (PTBK) dan *peer teaching/peer counseling* yang diakhiri dengan ujian tulis formatif (UTF) dengan instrumen yang disusun oleh LPTK penyelenggara. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus UTF akan dilanjutkan dengan melaksanakan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) di sekolah tempat guru bertugas. Bagi peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang tidak lulus UTF, diberi kesempatan mengikuti UTF ulang maksimum 2 (dua) kali dan apabila tidak lulus setelah 2 (dua) kali mengikuti ujian ulang, dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat langsung diusulkan kembali untuk mengikuti *workshop* pada tahun berikutnya.
6. PKM dilaksanakan di sekolah selama 2 bulan (di luar libur antar semester) dengan kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok guru yang meliputi penyusunan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK), melaksanakan proses pembelajaran/layanan konseling/layanan TIK, implementasi PTK/PTBK, melaksanakan penilaian, pembimbingan, dan kegiatan persekolahan lainnya.

Rambu-rambu pelaksanaan PKM adalah sebagai berikut:

- 1) PKM dilaksanakan di sekolah tempat guru bertugas.
 - 2) Beban belajar PKM 14 SKS dengan durasi waktu 2 bulan, dengan ekivalen waktu 10 jam per hari.
 - 3) Supervisi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh guru inti atau pengawas/kepala sekolah yang ditunjuk.
 - 4) Peserta PKM wajib melaksanakan dan membuat laporan PTK/PTBK sesuai dengan format dan waktu yang ditentukan dan disahkan oleh kepala sekolah dan dipublikasikan di perpustakaan/ruang baca sekolah.
 - 5) Uji kinerja dilaksanakan di akhir PKM oleh Asesor LPTK Penyelenggara dan guru inti (supervisor setempat), peserta wajib menyerahkan perangkat pembelajaran (RPP/RPPBK) yang akan dipraktikkan pada saat uji kinerja.
 - 6) Peserta yang belum lulus ujian kinerja, diberikan kesempatan menempuh ujian ulang maksimum 2 (dua) kali.
 - 7) Uji kinerja dilaksanakan di sekolah *cluster* dan penetapannya disesuaikan dengan kondisi geografis setempat dan/atau disesuaikan dengan KKG dan MGMP.
 - 8) Ujian Tulis Nasional (UTN) dilaksanakan secara *on-line* dan untuk daerah tertentu secara *off-line*.
7. Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang lulus uji kinerja dan UTN akan memperoleh sertifikat pendidik, sedangkan peserta yang belum lulus, diberi kesempatan mengulang sebanyak 2 (dua) kali untuk ujian yang belum memenuhi syarat kelulusan. Bagi peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua, peserta dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memperoleh pembinaan dan dapat diusulkan mengikuti PKM tahun berikutnya.

B. Prinsip Sertifikasi Guru Melalui PPGJ

1. Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel

- a. Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru melalui PPGJ memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti sertifikasi guru melalui PPGJ.
- b. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta dan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.
- d. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak.
- e. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional

Sertifikasi guru melalui PPGJ merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru. Oleh karenanya guru yang lulus sertifikasi guru melalui PPGJ dan memperoleh sertifikat pendidik harus dapat menjamin (mencerminkan) bahwa guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional. Guru yang lulus sertifikasi guru melalui PPGJ akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

3. Dilaksanakan secara taat azas

Sertifikasi guru melalui PPGJ dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada buku Pedoman Sertifikasi Guru melalui PPGJ yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan. Dengan pemetaan yang baik diharapkan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan.

BAB III

PESERTA SERTIFIKASI GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015

A. Sasaran

Sertifikasi guru melalui PPGJ diperuntukkan bagi guru dalam jabatan yang berstatus PNS dan bukan PNS pada semua jenjang pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **yang memenuhi persyaratan**.

Jumlah sasaran secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan penetapan sasaran peserta per provinsi dan per kabupaten/kota didasarkan pada data hasil uji kompetensi (UKA dan UKG), termasuk guru yang bertugas di sekolah Indonesia luar negeri (SILN).

B. Persyaratan Peserta

Guru yang dapat mengikuti Sertifikasi Guru melalui PPGJ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
2. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru Pendidikan Agama.
3. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan, bagi perguruan tinggi swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat. Bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1 ketika sudah menjadi guru, dibuktikan dengan surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang, sedangkan bagi guru bukan PNS, dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV.

4. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan/GTY) minimum 2 tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan SK Guru Tetap Yayasan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur/Pejabat yang berwenang.
5. Pada tanggal **1 Januari 2016** belum memasuki usia 60 tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti *workshop* yang menyebabkan tidak mampu mengikuti kegiatan *workshop*, maka LPTK **berhak** meminta pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaan yang bersangkutan dalam *workshop*.
7. **Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi kedua)** dengan ketentuan:
 - a. Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, **harus** memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota/Pejabat yang berwenang.
 - b. Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat penerapan Kurikulum 2013 yang meliputi:
 - 1) guru bersertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK kode 224), Keterampilan Komputer dan Pengelolaan

- Informasi (KKPI kode 330) diharuskan memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang linier dengan bidang studi sertifikasinya;
- 2) guru IPA di SMK (kode 097), IPS di SMK (kode 100), Keterampilan di SMP dan SMA (kode 227), Kewirausahaan di SMK (kode 331)
- c. Guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan pada bidang studi sertifikasi yang berbeda karena alasan linieritas, diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
8. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
- a. diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan
 - b. memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

C. Penetapan Peserta

1. Ketentuan Umum

- a. Semua guru yang memenuhi persyaratan peserta sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan seleksi akademik berbasis hasil uji kompetensi (UKA atau UKG). UKA dan UKG yang dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 dan 2014. Guru dalam jabatan yang belum memiliki nilai UKA/UKG akan diikutkan pada pelaksanaan UKA tahun 2015.
- b. Guru yang **didiskualifikasi** pada sertifikasi tahun 2007-2014 karena **pemalsuan dokumen**, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai peserta sertifikasi guru melalui PPGJ sesuai Pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- c. Guru berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang **tidak lulus** sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

- d. Guru berkualifikasi akademik **BELUM S-1/D-IV yang TIDAK LULUS** sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015, apabila pada **30 November 2013**:
- 1) sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
 - 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).
- e. Penetapan bidang studi sertifikasi harus linier dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV, kecuali guru yang diangkat sebelum tahun 2006 penetapan bidang studi sertifikasi dapat mengacu pada kualifikasi akademik S-1/D-IV atau bidang studi yang diampu minimal 5 (lima) tahun berturut-turut.
- f. Penetapan peserta dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui *on-line system* dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ (AP2SG-PPGJ). Daftar ranking bakal calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ diumumkan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui situs **www.sergur.kemdiknas.go.id**
- g. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menghapus calon peserta yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ **atas persetujuan LPMP** dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:
- 1) meninggal dunia,
 - 2) sakit permanen,
 - 3) melakukan pelanggaran disiplin,
 - 4) mutasi ke jabatan selain guru,
 - 5) mutasi ke kabupaten/kota lain,
 - 6) mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain,
 - 7) pensiun,
 - 8) mengundurkan diri dari calon peserta,

- 9) sudah memiliki sertifikat pendidik baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain, kecuali sebagaimana yang dijelaskan pada poin 3 persyaratan peserta di atas.
- h. Calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 tidak dialih tugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun struktural.
- i. Penetapan calon peserta untuk jenjang TK, SD, dan SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK dan SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi, jika Dinas Pendidikan Provinsi belum siap, maka dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tempat guru bertugas.

2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik berbasis hasil UKA atau UKG akan ditetapkan sebagai peserta sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut.

- a. Seluruh peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013/2014 yang tidak lulus.
- b. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik dan dimutasikan untuk mengajar bidang tugas baru sesuai dengan kualifikasi akademik (selanjutnya disebut sertifikasi kedua) sesuai pasal 2 Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru dengan terlebih dahulu mengikuti UKA pada bidang tugas baru sesuai latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki.
- c. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik TIK kode 224 dan KKPI kode 330 (selanjutnya disebut sertifikasi kedua) sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Guru Keterampilan Komputer Dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013.

- d. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik IPA SMK kode 097 dan IPS SMK kode 100 (selanjutnya disebut sertifikasi kedua) yang mendapat tugas atau dimutasikan untuk mengampu mata pelajaran sesuai kualifikasi S-1/D-IV yang dimiliki dengan terlebih dahulu mengikuti UKA pada bidang tugas baru sesuai latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki.
- e. Guru yang diangkat sebelum bulan Januari tahun 2006
- f. Guru yang diangkat mulai 1 Januari Tahun 2006 (di ranking berdasarkan nilai UKA)

Data peserta sertifikasi guru melalui PPGJ sesuai dengan urutan di atas akan ditampilkan pada AP2SG-PPGJ untuk dijadikan dasar penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

D. Penetapan Bidang Studi

Bidang studi yang dipilih oleh guru pada sertifikasi guru melalui PPGJ harus linier dengan latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki kecuali guru yang diangkat sebelum tahun 2006 penetapan bidang studi sertifikasi dapat mengacu pada kualifikasi akademik S-1/D-IV atau bidang studi yang diampu minimal 5 (lima) tahun berturut-turut. Hal penting yang harus disadari oleh guru bahwa bidang studi ini akan melekat terus pada guru selama menjalankan profesi guru. Latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang linier dengan bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ dicantumkan dalam **Lampiran 1**.

Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ diharapkan tidak melakukan kesalahan dalam menuliskan nomor kode bidang studi karena bidang studi ini akan menjadi dasar penilaian oleh LPTK dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ. Kesalahan akan menyebabkan terjadinya penundaan proses sertifikasi guru melalui PPGJ di LPTK. Kode bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ ditunjukkan pada nomor peserta sertifikasi guru melalui PPGJ pada digit 7, 8, dan 9. Daftar kode bidang studi dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ menjadi acuan dasar dalam beberapa kebijakan, yaitu:

- penentuan soal uji kompetensi;
- penentuan pembagian tugas mengajar guru;
- pemberian tunjangan profesi guru;
- penilaian kinerja guru; dan
- pengembangan keprofesian berkelanjutan.

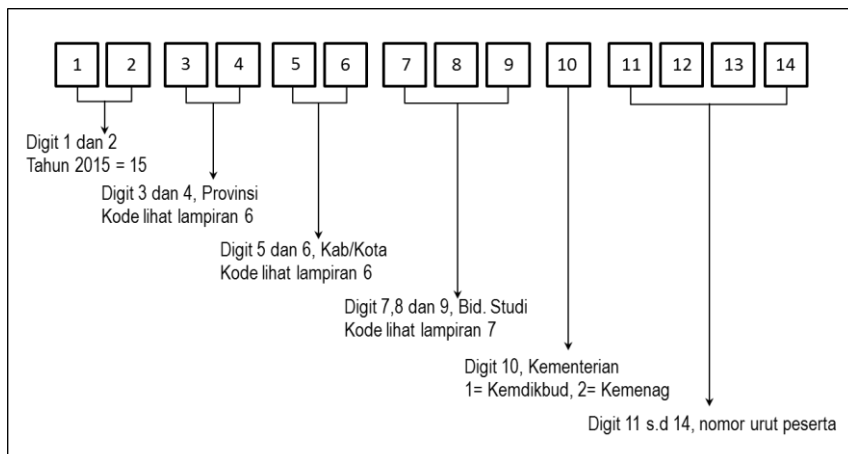
E. Penomoran Peserta

Nomor peserta sertifikasi guru melalui PPGJ adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dan spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat. Nomor peserta ini akan digunakan terus oleh peserta mulai pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ sampai dengan penyaluran tunjangan profesi guru.

Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut.

- a. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ yaitu "15".
- b. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (Lampiran 3).
- c. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota (Lampiran 3).
- d. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi sertifikasi (Lampiran 2).
- e. Digit 10 adalah kode kementerian:
 - 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kode "1".
 - 2) Kementerian Agama, kode "2".
- f. Digit 11 s.d. 14 adalah nomorurut peserta sesuai dengan nomorurut pada SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ. Nomorurut dimulai dari "0001" dan nomor terakhir sesuai jumlah peserta pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Digit pada nomor peserta dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Nomor Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Contoh nomor peserta:

Guru “B” adalah peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia (kode 156) di SMP Negeri 1 provinsi Bali (kode 22) Kabupaten Badung (kode 04) sebagai peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015, guru tersebut menduduki urutan ranking no “25” sebagaimana tertera pada daftar calon peserta pada AP2SG-PPGJ. Nomor peserta guru “B” adalah:

15 22 04 156 1 0025

BAB IV

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI MELALUI PPGJ TAHUN 2015

Penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai urutan prioritas. Untuk itu Badan PSDMPK-PMP telah mengembangkan AP2SG-PPGJ secara *on-line* dan terintegrasi dengan *data base* NUPTK. Aplikasi tersebut telah difasilitasi dengan informasi persyaratan peserta dan prioritas perankingan. Aplikasi bekerja secara otomatis menampilkan guru-guru yang memenuhi syarat. AP2SG-PPGJ menampilkan daftar **bakal calon peserta** sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

Proses penetapan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: 1) Badan PSDMPK-PMP, 2) LPMP, 3) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan 4) Guru. Kegiatan penetapan peserta akan terlaksana dengan lancar apabila komponen di bawah ini berlangsung dengan baik, yaitu:

1. informasi mengenai persyaratan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ diberikan kepada semua guru sesuai dengan ketentuan;
2. kebenaran data peserta dalam Format A1; dan
3. ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ.

Proses penetapan peserta melalui beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut ini.

A. Tahap Persiapan dan Sosialisasi

1. Publikasi Data Guru

Badan PSDMPK-PMP mempublikasikan data guru yang belum bersertifikat pendidik yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 melalui website www.sergur.kemdiknas.go.id oleh Badan PSDMPK-PMP. Data guru yang dipublikasi tersebut didasarkan pada pemutahiran data guru yang dilakukan secara *on-line* pada aplikasi Padamu Negeri.

2. Penyusunan Pedoman Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Badan PSDMPK dan PMP bersama Tim Sertifikasi guru menyusun pedoman yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015. Pedoman tersebut terdiri dari:

- a. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ
- b. Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui PPGJ
- c. Pedoman Penyusunan dan Penilaian RPL Sertifikasi Guru melalui PPGJ

3. Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Sebelum semua aktivitas kegiatan terkait penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dilakukan, yang pertama harus dilakukan adalah pembentukan Panitia Sertifikasi Guru melalui PPGJ (PSG) di tingkat LPMP, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. PSG bertanggungjawab terhadap suksesnya penyelenggaraan sertifikasi guru melalui PPGJ di tingkat LPMP, provinsi, dan kabupaten/kota. Apabila dinas pendidikan provinsi secara teknis belum siap mengelola pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2015, dapat berkoordinasi dengan atau menyerahkan kewenangannya ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

PSG ditetapkan setiap tahun dan harus melibatkan operator NUPTK sebagai salah satu anggota PSG. PSG di tingkat LPMP, provinsi, dan kabupaten/kota menjalankan proses penetapan peserta dan peran lainnya guna membantu pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ secara keseluruhan. Tugas dan tanggungjawab PSG masing-masing unit terkait sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

- a. PSG di Tingkat LPMP
 - 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya.

- 2) Melakukan persetujuan (*approval*) terhadap penghapusan calon peserta pada AP2SG-PPGJ yang dilakukan PSG dinas provinsi/kabupaten/kota.
 - 3) Melaksanakan dan memantau uji kompetensi.
 - 4) Melakukan verifikasi berkas pendukung sebagai dasar persetujuan (*approval*) Format A1 untuk ditetapkan sebagai peserta final. Contoh format A1 pada Lampiran 4.
 - 5) Mencetak **Format B1** dari AP2SG-PPGJ program sebanyak 3 (tiga) rangkap dan memberikan pengesahan pada **Format B1** dengan menandatangani dan membubuhi stempel. Pendistribusian 3 rangkap Format B1 tersebut adalah sebagai berikut.
 - Satu rangkap masing-masing untuk LPMP dan LPTK
 - Satu rangkap untuk dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- b. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi (**Jika tidak siap dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**)
- 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ kepada guru SMA, SMK, SLB dan masyarakat.
 - 2) Mengelola calon peserta UKA
 - a) Melakukan pendaftaran calon peserta uji kompetensi secara online melalui AP2SG-PPGJ.
 - b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dan validasi berkas data calon peserta UKA.
 - c) Menetapkan peserta uji kompetensi dan distribusi peserta ke TUK.
 - d) Berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP dalam menentukan lokasi TUK, melaksanakan dan memantau uji kompetensi

- 3) Mengelola calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ
 - a) Mengusulkan penghapusan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang ada pada AP2SG-PPGJ.
 - b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dan validasi berkas data calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.
 - c) Melakukan perbaikan data guru pada AP2SG-PPGJ pada *field* mata pelajaran sertifikasi guru melalui PPGJ yang akan digunakan sebagai dasar penetapan sertifikasi guru melalui PPGJ.
 - d) Mencetak Format A1 dari AP2SG-PPGJ sebanyak 4 (empat) rangkap (didistribusikan ke Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, LPTK dan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ, dan memberikan pengesahan pada Format A1 dengan menandatangani dan membubuhi stempel.
 - e) Mengumpulkan semua berkas/dokumen peserta sertifikasi guru melalui PPGJ 2015.
 - f) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen RPL peserta sertifikasi guru melalui PPGJ kemudian mengirimkan ke LPTK.
 - g) Mendistribusikan **Format A1** yang sudah disahkan Dinas kepada peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.
 - h) Berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam melaksanakan dan memantau proses penetapan peserta.
 - i) Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ.
- c. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ kepada guru TK, SD, SMP dan masyarakat.
 - 2) Mengelola calon peserta UKA
 - a) Melakukan pendaftaran calon peserta uji kompetensi secara online melalui AP2SG-PPGJ.

- b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dan validasi berkas data calon peserta UKA.
 - c) Menetapkan peserta uji kompetensi dan distribusi peserta ke TUK.
 - d) Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan LPMP dalam menentukan lokasi TUK, melaksanakan dan memantau uji kompetensi
- 3) Mengelola calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ
- a) Mengusulkan penghapusan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ yang ada pada AP2SG-PPGJ.
 - b) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dan validasi berkas data calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.
 - c) Melakukan perbaikan data guru pada AP2SG-PPGJ pada *field* mata pelajaran sertifikasi guru melalui PPGJ yang akan digunakan sebagai dasar penetapan sertifikasi guru melalui PPGJ.
 - d) Mencetak Format A1 sebanyak 4 (empat) rangkap (Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, LPTK dan peserta sertifikasi) dan memberikan pengesahan pada Format A1 dengan menandatangani dan membubuhi stempel.
 - e) Mengumpulkan semua berkas peserta sertifikasi guru tahun 2015.
 - f) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen RPL peserta sertifikasi guru kemudian mengirimkan ke LPTK.
 - g) Mendistribusikan **Format A1** yang sudah disahkan Dinas kepada peserta sertifikasi guru.
 - h) Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan LPMP dalam melaksanakan dan memantau proses penetapan peserta.
 - i) Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru.

4. Sosialisasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Sosialisasi penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan guru calon peserta sertifikasi melalui PPGJ. Materi sosialisasi yang wajib disampaikan antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ, persyaratan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG-PPGJ, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015. Rangkaian sosialisasi dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Sosialisasi oleh Badan PSDMPK-PMP ke LPMP
- b. Sosialisasi oleh LPMP ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- c. Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota

B. Tahap Seleksi dan Penetapan Peserta

1. Calon Peserta UKA

Calon peserta UKA adalah guru yang tidak lulus PLPG tahun sebelumnya dan sudah UKA yang mengganti bidang studi sertifikasi, mengikuti sertifikasi kedua dan yang belum mengikuti UKG tahun 2013 dan 2014.

a. Daftar Calon Peserta UKA

Penetapan daftar bakal calon peserta UKA dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui *online system* dengan menggunakan AP2SG-PPGJ. Daftar ranking bakal calon peserta UKA diumumkan oleh BPSDMPK-PMP melalui laman www.sergur.kemdiknas.go.id. Selanjutnya dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP melakukan verifikasi dan validasi terhadap data bakal calon peserta UKA tersebut.

b. Pemilihan Bidang Studi UKA oleh Guru

Bidang studi yang akan diujikan harus sesuai dengan bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ yang telah ditetapkan (**lampiran 2**) dengan mempertimbangkan linearitas latar belakang pendidikan sesuai **lampiran 1**. Khusus bagi guru produktif SMK, soal uji kompetensi didasarkan atas program studi keahlian bukan berdasarkan paket keahlian. Informasi lengkap tentang program studi keahlian dan paket keahlian dapat dilihat pada Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (**Lampiran 2 B**).

c. Penyusunan Berkas Administrasi

Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta UKA tahun 2015 adalah:

- 1) Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) yang telah disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan.
- 2) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (bagi PNS).
- 3) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
- 4) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung.
- 5) Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).
- 6) Surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat bagi lulusan perguruan tinggi swasta.
- 7) Surat izin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1/DIV ketika sudah mengajar, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari

ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV.

- 8) Surat Pernyataan dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Contoh format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 6**
- 9) Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik harus menyertakan:
 - a) Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota bagi guru yang dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.
 - b) Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK dan Kewirausahaan yang dimutasi/mengampu mata pelajaran lain sesuai kualifikasi/latar belakang S-1/D-IV yang dimiliki.
 - c) Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan.
 - d) Fotocopy Sertifikat Pendidik.

Dokumen/berkas yang dikumpulkan harus dilengkapi dengan format verifikasi kelengkapan dokumen/berkas sebagaimana **Lampiran 5** yang telah diisi. Format verifikasi kelengkapan data ini

kemudian diteruskan ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota dan LPMP untuk diisi pada kolom yang bersangkutan.

Dokumen/berkas diurutkan sesuai urutan pada format verifikasi kelengkapan. Setiap pergantian jenis dokumen/berkas diberi pembatas kertas berwarna. Pengumpulan berkas dimulai setelah pengumuman penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015, paling lambat **sesuai jadwal (lampiran 7)**.

Data guru yang akan mengikuti sertifikasi guru melalui PPGJ harus benar dan valid karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan soal uji kompetensi, bidang studi sertifikasi guru melalui PPGJ, dan data yang akan dicantumkan dalam sertifikat pendidik.

d. Menetapkan Lokasi UKA

LPMP berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota untuk menentukan tempat uji kompetensi (TUK). Secara umum lokasi TUK yang ditetapkan harus mempertimbangkan kemudahan akses ke lokasi tersebut dan diutamakan yang dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

Pada pelaksanaan UKA yang menggunakan sistem *off-line* dapat menggunakan ruang kelas di sekolah atau ruang sidang/ruang pertemuan kantor dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP.

UKA yang menggunakan sistem *on-line* dilaksanakan di sekolah yang sudah pernah menjadi tempat uji kompetensi (TUK) pada pelaksanaan UKA *on-line* tahun 2013/2014.

e. Daftar Peserta UKA per Lokasi TUK

LPMP berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota mengelola data guru peserta UKA per TUK berdasarkan pertimbangan asal sekolah/domisili guru, kapasitas TUK dan pengelompokan bidang studi yang dipilih. Masing-

masing peserta akan memperoleh Kartu Peserta Uji Kompetensi yang dicetak dari AP2SG-PPGJ oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, yang selanjutnya mendistribusikan kepada guru peserta UKA paling lambat **2 minggu** sebelum hari pelaksanaan UKA.

Sebelum mengikuti uji kompetensi, guru wajib meneliti/memastikan kebenaran/kesesuaian nomor peserta, kode bidang studi sertifikasi dan soal uji kompetensi yang akan diikuti, karena penggantian kode bidang studi tidak dapat dilakukan pada saat uji kompetensi berlangsung. Apabila ada bidang studi yang tercantum dalam Kartu Peserta Uji Kompetensi tidak sesuai dengan yang dipilih pada proses pendaftaran calon peserta UKA, guru yang bersangkutan dapat melakukan koreksi kepada LPMP melalui dinas pendidikan masing-masing **1 minggu** sebelum hari pelaksanaan UKA.

f. Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA)

Uji kompetensi yang dilakukan secara *off-line* atau *on-line* bertempat di TUK yang telah ditetapkan bersama oleh LPMP dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Seluruh calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 yang sudah dicantumkan dalam Daftar Peserta UKA harus mengikuti uji kompetensi awal sesuai bidang studi yang dipilih dan dilaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan di masing-masing kabupaten/kota.

2. Calon Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ

a. Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ

Badan PSDMPK-PMP berdasarkan hasil UKA guru tahun 2013/2014 dan 2015 menetapkan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

b. Penyusunan Berkas Administrasi

Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 **yang telah memiliki nilai**

UKA/UKG sama dengan berkas administrasi yang disusun oleh guru calon peserta UKA (**BAB IV Sub Bab B butir c**).

Pengumpulan berkas dimulai setelah pengumuman penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 sesuai jadwal (**lihat lampiran 7**).

c. Verifikasi Berkas Administrasi Guru oleh Dinas Pendidikan

Berkas administrasi guru calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ diverifikasi oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing dengan menggunakan format pada **Lampiran 5** dan mengirimkan hasilnya ke LPMP. Dalam tahap ini dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota berkewajiban **memverifikasi keabsahan ijazah S-1/D-IV** peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.

d. Verifikasi Berkas Administrasi Guru oleh LPMP

LPMP memverifikasi berkas administrasi yang diterima dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. LPMP memeriksa kembali kelengkapan persyaratan dengan cara mengisi format verifikasi kelengkapan data (**format pada Lampiran 5**) yang sudah diisi oleh guru dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Batas waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi berkas di LPMP sesuai dengan jadwal (**lampiran 7**). Setelah verifikasi/persetujuan dilakukan melalui sistem AP2SG-PPGJ, maka format A1 dapat dicetak oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Berkas administrasi guru yang sudah diverifikasi LPMP dan dinyatakan belum lengkap akan dikembalikan ke guru melalui dinas pendidikan yang bersangkutan untuk diperbaiki.

e. Pengumpulan Berkas Administrasi Yang Diperbaiki

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengumpulkan berkas administrasi guru yang harus diperbaiki untuk diteruskan ke guru yang bersangkutan.

f. Perbaiki Berkas Administrasi oleh Guru

Guru memperbaiki berkas administrasi yang belum lengkap sesuai dengan koreksi dari dinas pendidikan dan LPMP. Berkas perbaikan diserahkan kembali ke dinas pendidikan untuk diverifikasi ulang dan diteruskan ke LPMP. Perbaikan berkas administrasi oleh guru diserahkan ke dinas pendidikan **sesuai jadwal pada lampiran 7**. Guru yang tidak menyerahkan berkas sampai batas waktu tersebut dinyatakan gugur sebagai calon peserta PPGJ.

g. Mencetak Format B.1

Berdasarkan daftar calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi, LPMP mencetak Format B1 berupa daftar peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dan ditandatangani oleh Kepala LPMP dan mengirim ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPTK **sesuai jadwal pada lampiran 7**.

h. Mencetak Format A1

Dinas pendidikan mencetak Format A1 sebanyak 2 (dua) rangkap, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk kemudian dan dibubuhi stempel sebagai tanda pengesahan.

Dinas pendidikan mengirim 1 (satu) lembar Format A1 yang telah ditandatangani dan dicap kepada calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ **sesuai jadwal pada lampiran 7**.

i. Menerima Format A.1

Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ menerima Format A1 asli (bukan foto kopi) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Format A1 wajib dibawa peserta pada saat datang mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ di LPTK. Peserta menerima Format A1 sebagai tanda persetujuan untuk menyiapkan dokumen RPL.

C. Tahap Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen RPL

1. Penyusunan Dokumen RPL

Peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015 yang telah ditetapkan harus menyusun dokumen RPL serta melampirkan fotocopy Format A1 yang telah ditandatangani oleh dinas pendidikan. Dokumen RPL yang harus disusun oleh peserta meliputi komponen-komponen sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Dokumen RPL Sertifikasi Guru melalui PPGJ

| No | Komponen | Unsur yang Dinilai |
|----|--|---|
| 1 | Pengalaman Pembelajaran dan Pengembangan Diri | a. Deskripsi diri b. Pengalaman Mengajar c. Pendidikan S2/S3 d. Pelatihan |
| 2 | Analisis Buku Ajar/ Analisis Program Layanan BK | Analisis Buku Guru/Siswa (Guru Kelas/Guru Mapel) atau Analisis Program Layanan BK/Guru BK) |
| 3 | Perangkat Pembelajaran/Layanan | a. RPP/RPBK b. Pengembangan Bahan Ajar/Layanan c. Media Pembelajaran/ Inovasi Layanan d. Instrumen Penilaian |
| 4 | Analisis Penilaian Hasil Belajar/Layanan Bimbingan Siswa <i>Sesuai</i> | a. Dokumen Analisis Hasil Penilaian b. Dokumen Penyajian Hasil Belajar |
| 5 | Pembelajaran/Layanan Bimbingan yang dibuktikan dengan rekaman video | a. Orisinalitas b. Keterlaksanaan Langkah Pembelajaran/ Layanan BK c. Pendekatan Sainifik/Inovasi Layanan BK |
| 6 | Penilaian Atasan Langsung | a. Penilaian Kepala Sekolah b. Penilaian Pengawas |
| 7 | Prestasi Akademik dan/atau Karya Monumental | a. Guru Berprestasi/Guru Teladan/ Pemandu/ Instruktur/ Guru Inti b. Karya Tulis Terpublikasi c. Presentasi Karya Ilmiah d. Penghargaan Prestasi di Masyarakat yang Relevan |

Ketentuan lebih rinci dari penyusunan dokumen RPL dapat dilihat di Panduan Penyusunan dan Penilaian RPL.

2. Pengumpulan Dokumen RPL

Dokumen RPL yang telah disusun oleh guru dikumpulkan di dinas provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya diserahkan ke LPMP.

3. Penyatuan Berkas Administrasi dan Dokumen RPL

LPMP menyatukan berkas persyaratan administrasi dan dokumen RPL guru untuk dikirim ke LPTK pelaksana sertifikasi guru.

4. Penerimaan Berkas Data dan Dokumen RPL

LPTK menerima data guru yang dapat diunduh di ASG masing-masing LPTK dan menerima berkas Administrasi dan dokumen RPL dari LPMP sesuai dengan distribusi peserta sertifikasi guru melalui PPGJ tahun 2015.

5. Pengumpulan Dokumen RPL Yang Diperbaiki

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menerima dokumen RPL guru yang harus diperbaiki dari LPTK, mendistribusikan ke guru yang bersangkutan untuk diperbaiki dan menginformasikan batas waktu perbaikan yang disyaratkan oleh LPTK.

6. Perbaikan Dokumen RPL

Peserta sertifikasi guru memperbaiki dokumen RPL berdasarkan saran dan koreksi dari LPTK, dilakukan oleh guru dalam kurun waktu yang ditentukan oleh LPTK penyelenggara. Dokumen RPL yang sudah diperbaiki diserahkan kembali ke dinas pendidikan untuk diteruskan ke LPTK.

7. Pengumpulan Dokumen RPL Perbaikan

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengumpulkan dokumen RPL yang sudah diperbaiki dan mengirimkan kembali ke LPTK sesuai tengat waktu yang ditentukan LPTK penyelenggara.

D. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru melalui PPGJ Tahun 2015

1. Penilaian RPL

Rayon LPTK melakukan penilaian dokumen RPL dan dokumen terkait lainnya. Bagi guru dengan nilai RPL yang memenuhi persyaratan dapat dipanggil untuk mengikuti kegiatan *workshop*. Apabila nilai RPL peserta sertifikasi guru melalui PPGJ belum memenuhi persyaratan maka dokumen RPL dikembalikan kepada guru bersangkutan melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota untuk diperbaiki. Aturan teknis selanjutnya terkait RPL sesuai dengan **buku 2**.

Pada tahap ini, LPTK diharapkan memeriksa kembali keabsahan ijazah guru bersangkutan. Apabila ditemukan ijazah yang tidak sah menurut ketentuan undang-undang, maka harus dilaporkan kepada dinas pendidikan dan guru bersangkutan.

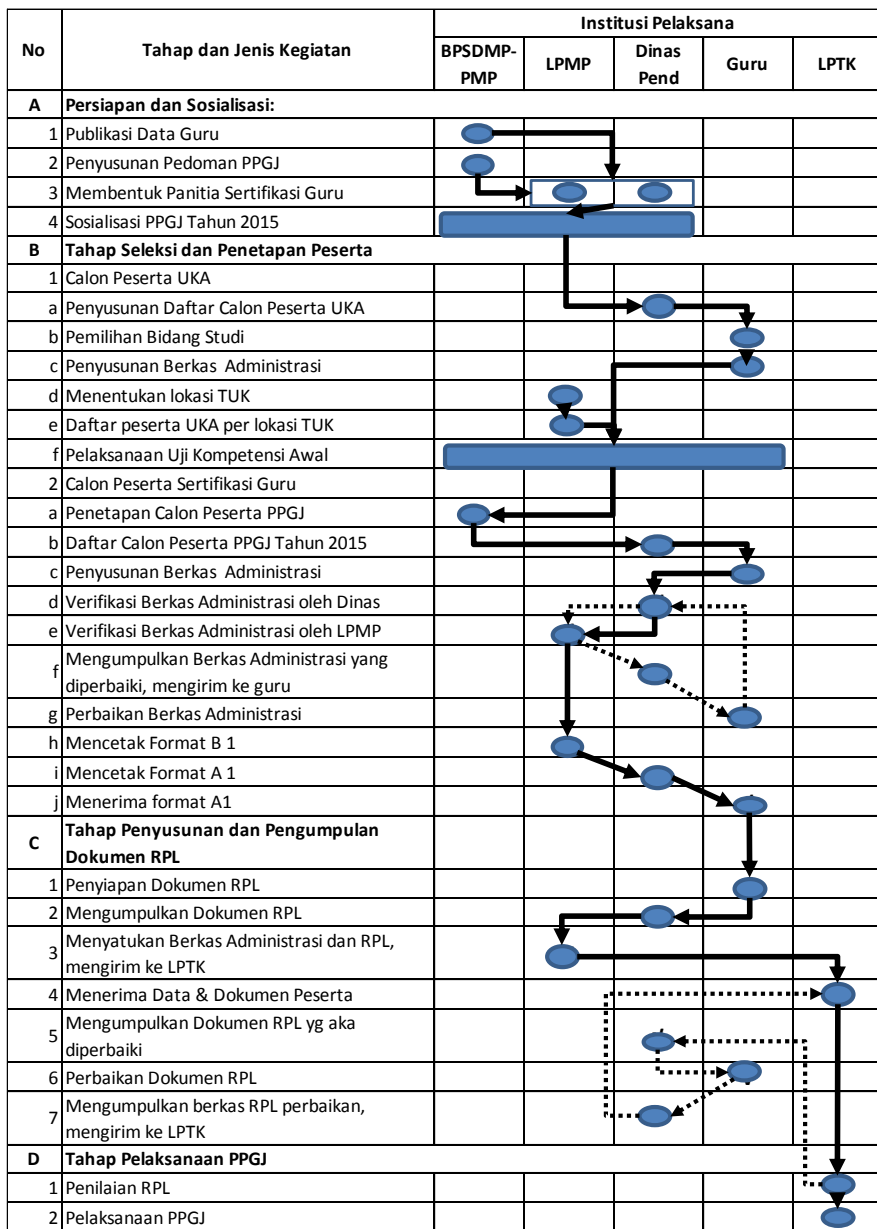
2. Pelaksanaan *Workshop*

Rayon LPTK melaksanakan *Workshop* selama 16 hari (168 JP) dengan kegiatan-kegiatan yang mencakup pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, PTK/PTBK dan *peer teaching/peer counseling* yang diakhiri dengan ujian tulis formatif (UTF).

3. Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM)

Peserta sertifikasi guru yang dinyatakan lulus kegiatan *workshop* akan melaksanakan PKM selama 60 hari efektif (di luar libur antar semester). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta sertifikasi dalam PKM merupakan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok guru.

Prosedur operasional standar (POS) tahapan prosedur penetapan peserta dalam bentuk matriks dan gambar dapat dilihat dalam diagram berikut ini.



Gambar 4.1 Tahapan Prosedur Penetapan Peserta Sertifikasi Guru melalui PPGJ Tahun 2015

BAB V

PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian program penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ ini dimaksudkan agar proses penetapan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Pengendalian program penetapan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.

A. Ruang Lingkup Pengendalian

Ruang lingkup atau cakupan pengendalian program meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Pengendalian dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala selama proses penetapan peserta. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi:

- Pelaksanaan perbaikan (*updating*) data guru
- Jadwal persiapan dan pelaksanaan program.
- Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.
- Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.
- Pelaporan dari pihak yang terkait (akademis dan keuangan).
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

B. Pemantauan Program

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini.

- Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta sertifikasi guru melalui PPGJ menggunakan indikator pada ruang lingkup pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui

penyusunan kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan.

- Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, pedoman observasi atau pedoman wawancara.
- Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsur-unsur yang ada di pusat.
- Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang relevan.
- Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana/petugas pemantau.

C. Unit Pelayanan Masyarakat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang sertifikasi guru melalui PPGJ, Badan PSDMPK-PMP membuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayanan masyarakat (UPM). Di samping sebagai pelayanan masyarakat, UPM dapat juga menjadi tempat pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ, khususnya tentang penetapan peserta sertifikasi guru melalui PPGJ.

UPM berfungsi sebagai berikut.

1. pelayanan informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ.
2. mediator antara masyarakat dengan penyelenggara sertifikasi guru melalui PPGJ.

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi keterlaksanaan program sertifikasi guru melalui PPGJ dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPGJ.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV Guru dengan Bidang Studi Sertifikasi
- Lampiran 2 : Kode Bidang Studi Sertifikasi
- Lampiran 3 : Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Lampiran 4 : Contoh Format A1
- Lampiran 5 : Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas
- Lampiran 6 : Format Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen
- Lampiran 7 : Jadwal Kegiatan

Lampiran 1

Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi

Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara bidang studi pada ijazah S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi guru sebagai berikut.

A. Guru Mata Pelajaran Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB

| No | Bidang Studi Sertifikasi | Kode | S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan |
|-----|--|------|---|
| 1. | Guru Kelas TK | 020 | PGTK/PAUD dan Psikologi |
| 2. | Guru Kelas SD | 027 | PGSD, Psikologi, IPA/IPS, Matematika, Bhs Indonesia, Fisika, Kimia, Biologi, PPKn, Sejarah, Geografi, Ekonomi |
| 3. | Pendidikan Luar Biasa | 800 | Pendidikan Guru Luar Biasa, Pendidikan Khusus |
| 4. | Seni Budaya | 217 | Seni Budaya dan/atau yang relevan |
| 5. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 | Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan/atau yang relevan |
| 6. | Bahasa Jawa | 746 | Bahasa dan/atau Sastra Jawa |
| 7. | Bahasa Sunda | 748 | Bahasa dan/atau Sastra Sunda |
| 8. | Bahasa Bali | 750 | Bahasa dan/atau Sastra Bali |
| 9. | Bahasa Inggris | 157 | Bahasa dan/atau Sastra Inggris |
| 10. | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 | IPS, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Antropologi |
| 11. | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 097 | IPA, Fisika, Kimia, Biologi |
| 12. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) | 154 | PPKn, PKn, Civic Hukum |
| 13. | Bahasa Indonesia | 156 | Bahasa dan/atau Sastra Indonesia |
| 14. | Matematika | 180 | Matematika |
| 15. | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 | Bimbingan dan Konseling, Bimbingan dan Penyuluhan, Psikologi |
| 16. | Geografi | 207 | Geografi |
| 17. | Ekonomi | 210 | Ekonomi, Ekonomi Koperasi, Pendidikan Dunia Usaha |
| 18. | Sosiologi | 214 | Sosiologi, Antropologi |

| No | Bidang Studi Sertifikasi | Kode | S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan |
|-----|--------------------------|------|--|
| 19. | Antropologi | 215 | Antropologi, Sosiologi |
| 20. | Bahasa Jerman | 160 | Bahasa dan/atau Sastra Jerman |
| 21. | Bahasa Perancis | 164 | Bahasa dan/atau Sastra Perancis |
| 22. | Bahasa Arab | 167 | Bahasa dan/atau Sastra Arab |
| 23. | Bahasa Jepang | 170 | Bahasa dan/atau Sastra Jepang |
| 24. | Bahasa Mandarin | 174 | Bahasa dan/atau Sastra Mandarin |
| 25. | Fisika | 184 | Fisika, Pend. Fisika |
| 26. | Kimia | 187 | Kimia, Pend. Kimia |
| 27. | Biologi | 190 | Biologi, Pend. Biologi |
| 28. | Sejarah | 204 | Sejarah, Pend. Sejarah |
| 29. | TIK | 224 | Teknik Informasi, Teknik Komputer, Pendidikan Teknik Informatika |

B. Guru Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

| No | Bidang Studi Sertifikasi | Kode | S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan |
|----|---|------|--|
| 1 | Teknik Konstruksi Baja | 401 | Bangunan/Sipil, Arsitektur, Pend. Teknik Sipil |
| 2 | Teknik Konstruksi Kayu | 402 | |
| 3 | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 403 | |
| 4 | Teknik Gambar Bangunan | 406 | |
| 5 | Teknik Furnitur | 616 | |
| 6 | Teknik Plambing dan Sanitasi | 407 | |
| 7 | Geomatika | 671 | Teknik Geodesi |
| 8 | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 415 | Teknik Listrik, Teknik Elektro, Pend. Teknik Elektro |
| 9 | Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 672 | |
| 10 | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 673 | |
| 11 | Teknik Otomasi Industri | 618 | |
| 12 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 536 | |
| 13 | Teknik Pemesinan | 424 | Teknik Mesin, Pend. Teknik Mesin |
| 14 | Teknik Pengelasan | 421 | |
| 15 | Teknik Fabrikasi Logam | 422 | |
| 16 | Teknik Pengecoran Logam | 423 | |
| 17 | Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 674 | |
| 18 | Teknik Gambar Mesin | 426 | |
| 19 | Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Power Plant</i>) | 470 | Teknik Pesawat Udara |
| 20 | Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>) | 467 | |
| 21 | Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>) | 469 | |
| 22 | Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanics</i>) | 468 | |
| 23 | Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>) | 472 | |
| 24 | Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>) | 473 | |

| No | Bidang Studi Sertifikasi | Kode | S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan |
|----|---|------|--|
| 25 | Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Electrical Avionics</i>) | 471 | |
| 26 | Persiapan Grafika | 492 | Teknik Grafika |
| 27 | Produksi Grafika | 491 | |
| 28 | Teknik Instrumentasi Logam | 501 | Teknik Instrumentasi Industri |
| 29 | Kontrol Proses | 499 | |
| 30 | Kontrol Mekanik | 500 | Teknik Industri |
| 31 | Teknik Pelayanan Produksi | 592 | |
| 32 | Teknik Pergudangan | 675 | Teknologi Tekstil |
| 33 | Teknik Pemintalan Serat Buatan | 484 | |
| 34 | Teknik Pembuatan Benang | 485 | |
| 35 | Teknik Pembuatan Kain | 486 | |
| 36 | Teknik Penyempurnaan Tekstil | 590 | Teknik Perminyakan, Teknik Pertambangan |
| 37 | Teknik Produksi Minyak dan Gas | 676 | |
| 38 | Teknik Pemboran Minyak dan Gas | 677 | |
| 39 | Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia | 597 | Geologi Pertambangan |
| 40 | Geologi Pertambangan | 495 | |
| 41 | Kimia Analisis | 506 | Kimia, Teknik Kimia |
| 42 | Kimia Industri | 505 | |
| 43 | Teknik Kendaraan Ringan | 586 | Teknik Otomotif |
| 44 | Teknik Sepeda Motor | 587 | |
| 45 | Teknik Alat Berat | 428 | |
| 46 | Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 429 | Teknik Perkapalan |
| 47 | Teknik Konstruksi Kapal Baja | 476 | |
| 48 | Teknik Konstruksi Kapal Kayu | 481 | |
| 49 | Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | 588 | |
| 50 | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | 478 | |
| 51 | Teknik Pengelasan Kapal | 477 | |
| 52 | Kelistrikan Kapal | 479 | |
| 53 | Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 480 | |
| 54 | Interior Kapal | 589 | Teknik Elektronika |
| 55 | Teknik Audio Video | 533 | |
| 56 | Teknik Elektronika Industri | 534 | |
| 57 | Teknik Elektronika Komunikasi | 678 | |
| 58 | Teknik Mekatronika | 598 | |
| 59 | Teknik Ototronik | 430 | Teknik Sumber Daya Air, Teknik Energi Terbarukan |
| 60 | Teknik Energi Hidro | 679 | |

| No | Bidang Studi Sertifikasi | Kode | S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan |
|----|---|------|--|
| 61 | Teknik Energi Surya dan Angin | 680 | Teknik Energi Terbarukan |
| 62 | Teknik Energi Biomassa | 681 | |
| 63 | Rekayasa Perangkat Lunak | 524 | Komputer/Teknik Informatika, |
| 64 | Teknik Komputer dan Jaringan | 525 | |
| 65 | Multimedia | 526 | |
| 66 | Teknik Transmisi Telekomunikasi | 599 | Teknik Telekomunikasi |
| 67 | Teknik Suitsing | 517 | |
| 68 | Teknik Jaringan Akses | 600 | |
| 69 | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevision | 682 | Teknik <i>Broadcasting</i> |
| 70 | Keperawatan | 575 | Ilmu Keperawatan, Keperawatan |
| 71 | Keperawatan Gigi | 577 | |
| 72 | Analisis Kesehatan | 580 | Analisis Kesehatan |
| 73 | Farmasi | 582 | Farmasi, Teknik Farmasi |
| 74 | Farmasi Industri | 601 | |
| 75 | Pekerjaan Sosial | 683 | Pekerjaan Sosial |
| 76 | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 553 | Agribisnis Pertanian/Agronomi/Produksi Tanaman |
| 77 | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 558 | |
| 78 | Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman | 684 | |
| 79 | Agribisnis Ternak Ruminansia | 445 | Peternakan/Produksi Peternakan |
| 80 | Agribisnis Ternak Unggas | 446 | |
| 81 | Agribisnis Aneka Ternak | 610 | |
| 82 | Kesehatan Hewan | 611 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan |
| 83 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 456 | |
| 84 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 685 | |
| 85 | Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan | 686 | |
| 86 | Alat Mesin Pertanian | 687 | Mekanisasi Pertanian |
| 87 | Teknik Tanah dan Air | 688 | Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan |
| 88 | Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan | 689 | Kehutanan, Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Budidaya Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan. |
| 89 | Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | 690 | |
| 90 | Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | 691 | |
| 91 | Teknik Produksi Hasil Hutan | 692 | |

| No | Bidang Studi Sertifikasi | Kode | S-1/D-IV Kependidikan/Non-Kependidikan |
|-----|-----------------------------------|------|--|
| 92 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 511 | Teknologi Penangkapan Ikan |
| 93 | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 512 | |
| 94 | Budidaya Perikanan | 693 | Perikanan |
| 95 | Budidaya Krustacea | 694 | |
| 96 | Budidaya Keperangan | 695 | |
| 97 | Budidaya Rumput Laut | 696 | |
| 98 | Nautika Kapal Niaga | 509 | Pelayaran |
| 99 | Teknika Kapal Niaga | 510 | |
| 100 | Administrasi Perkantoran | 539 | Administrasi Perkantoran |
| 101 | Akuntansi | 540 | Akuntansi, Ekonomi |
| 102 | Perbankan | 543 | Perbankan, Akuntansi, Ekonomi |
| 103 | Perbankan Syariah | 697 | |
| 104 | Pemasaran | 615 | Pemasaran/Ekonomi |
| 105 | Usaha Perjalanan Wisata | 607 | Kepariwisataaan |
| 106 | Akomodasi Perhotelan | 549 | |
| 107 | Jasa Boga | 608 | Tata Boga/PKK |
| 108 | Patiseri | 434 | |
| 109 | Tata Kecantikan Rambut | 437 | Kecantikan/Tata Rias/PKK |
| 110 | Tata Kecantikan Kulit | 438 | |
| 111 | Tata Busana | 698 | Tata Busana/PKK |
| 112 | Seni Lukis | 603 | Seni Rupa |
| 113 | Seni Patung | 604 | |
| 114 | Desain Komunikasi Visual | 605 | Desain Komunikasi Visual, Grafika |
| 115 | Desain Interior | 699 | Desain Interior, Arsitektur |
| 116 | Animasi | 565 | Animasi, Multimedia |
| 117 | Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 460 | Seni Rupa/Kerajinan |
| 118 | Desain dan Produksi Kriya Kulit | 461 | |
| 119 | Desain dan Produksi Kriya Keramik | 462 | |
| 120 | Desain dan Produksi Kriya Logam | 463 | |
| 121 | Desain dan Produksi Kriya Kayu | 464 | |
| 122 | Seni Musik Klasik | 568 | Seni Musik |
| 123 | Seni Musik Non Klasik | 569 | |
| 124 | Seni Tari | 570 | Seni Tari |
| 125 | Seni Karawitan | 571 | Seni Karawitan |
| 126 | Seni Pedalangan | 572 | Seni Pedalangan |
| 127 | Pemeranan | 641 | Seni Teater |
| 128 | Tata Artistik | 642 | |

Lampiran 2 Kode Bidang Studi Sertifikasi

Kode Bidang Studi Sertifikasi/Mata Pelajaran (Digit 7, 8, dan 9)

A. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Kelompok Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK dan Kelompok Peminatan SMA

Kode bidang studi sertifikasi bagi guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum 2006 dan 2013. Kode ini digunakan juga untuk kode Bidang Studi bagi Pengawas Sekolah.

| No | Jenjang | Bidang Studi Sertifikasi | Kode |
|-----|--------------------|---|------|
| 1. | TK | Guru Kelas TK | 020 |
| 2. | SD | Guru Kelas SD | 027 |
| 3. | SDLB/SMPLB/SMALB | Pendidikan Luar Biasa | 800 |
| 4. | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Seni Budaya | 217 |
| 5. | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan | 220 |
| 6. | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Jawa | 746 |
| 7. | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Sunda | 748 |
| 8. | SD/SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Bali | 750 |
| 9. | SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Inggris | 157 |
| 10. | SMP/SLB/SMK | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 |
| 11. | SMP/SMK/SLB/SMK | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 097 |
| 12. | SMP/SMA/SMK/SLB | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 154 |
| 13. | SMP/SMA/SMK/SLB | Bahasa Indonesia | 156 |
| 14. | SMP/SMA/SMK/SLB | Matematika | 180 |
| 15. | SMP/SMA/SMK/SLB | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 |
| 16. | SMA | Geografi | 207 |
| 17. | SMA | Ekonomi | 210 |
| 18. | SMA | Sosiologi | 214 |
| 19. | SMA | Antropologi | 215 |

| No | Jenjang | Bidang Studi Sertifikasi | Kode |
|-----|---------|--------------------------|------|
| 20. | SMA/SMK | Bahasa Jerman | 160 |
| 21. | SMA/SMK | Bahasa Perancis | 164 |
| 22. | SMA/SMK | Bahasa Arab | 167 |
| 23. | SMA/SMK | Bahasa Jepang | 170 |
| 24. | SMA/SMK | Bahasa Mandarin | 174 |
| 25. | SMA/SMK | Fisika | 184 |
| 26. | SMA/SMK | Kimia | 187 |
| 27. | SMA/SMK | Biologi | 190 |
| 28. | SMA/SMK | Sejarah Indonesia | 204 |
| 29. | SMP/SMA | TIK | 224 |
| 30. | SMK | KKPI | 330 |

B. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Peminatan Kejuruan di SMK/MAK

Kode bidang studi sertifikasi guru mata pelajaran peminatan (produktif) SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis paket keahlian yang tercantum dalam Keputusan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Kode ini juga digunakan untuk kode bidang studi bagi Pengawas Sekolah.

| No. | Bidang Keahlian | No | Program Keahlian | Paket Keahlian | Kode |
|-----|------------------------|----|------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Teknologi dan Rekayasa | 1 | Teknik Bangunan | Teknik Konstruksi Baja | 401 |
| | | | | Teknik Konstruksi Kayu | 402 |
| | | | | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 403 |
| | | | | Teknik Gambar Bangunan | 406 |
| | | 2 | Teknik Furnitur | Teknik Furnitur | 616 |
| | | 3 | Teknik Plumbing dan Sanitasi | Teknik Plumbing dan Sanitasi | 407 |
| | | 4 | Geomatika | Geomatika | 671 |
| | | 5 | Teknik Ketenagalistrikan | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 415 |
| | | | | Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 672 |
| | | | | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 673 |
| | | | | Teknik Otomasi Industri | 618 |
| | | | | Teknik Pendingin dan Tata Udara | 536 |
| | | 6 | Teknik Mesin | Teknik Pemesinan | 424 |
| | | | | Teknik Pengelasan | 421 |
| | | | | Teknik Fabrikasi Logam | 422 |
| | | | | Teknik Pengecoran Logam | 423 |
| | | | | Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 674 |
| | | | | Teknik Gambar Mesin | 426 |
| | | | | 7 | Teknologi Pesawat Udara |

| No. | Bidang Keahlian | No | Program Keahlian | Paket Keahlian | Kode |
|-----|-----------------|----|-------------------------------|--|------|
| | | | | Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Power Plant</i>) | |
| | | | | Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>) | 467 |
| | | | | Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>) | 469 |
| | | | | Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanics</i>) | 468 |
| | | | | Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>) | 472 |
| | | | | Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>) | 473 |
| | | | | Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Electrical Avionics</i>) | 471 |
| | | 8 | Teknik Grafika | Persiapan Grafika | 492 |
| | | | | Produksi Grafika | 491 |
| | | 9 | Teknik Instrumentasi Industri | Teknik Instrumentasi Logam | 501 |
| | | | | Kontrol Proses | 499 |
| | | | | Kontrol Mekanik | 500 |
| | | 10 | Teknik Industri | Teknik Pelayanan Produksi | 592 |
| | | | | Teknik Pergudangan | 675 |
| | | 11 | Teknologi Tekstil | Teknik Pemintalan Serat Buatan | 484 |
| | | | | Teknik Pembuatan Benang | 485 |
| | | | | Teknik Pembuatan Kain | 486 |
| | | | | Teknik Penyempurnaan Tekstil | 590 |
| | | 12 | Teknik Perminyakan | Teknik Produksi Minyak dan Gas | 676 |
| | | | | Teknik Pemboran Minyak dan Gas | 677 |
| | | | | Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia | 597 |

| No. | Bidang Keahlian | No | Program Keahlian | Paket Keahlian | Kode |
|-----|------------------------------------|----|---------------------------------|------------------------------------|------|
| | | 13 | Geologi Pertambangan | Geologi Pertambangan | 495 |
| | | 14 | Teknik Kimia | Kimia Analisis | 506 |
| | | | | Kimia Industri | 505 |
| | | 15 | Teknik Otomotif | Teknik Kendaraan Ringan | 586 |
| | | | | Teknik Sepeda Motor | 587 |
| | | | | Teknik Alat Berat | 428 |
| | | | | Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 429 |
| | | 16 | Teknik Perkapalan | Teknik Konstruksi Kapal Baja | 476 |
| | | | | Teknik Konstruksi Kapal Kayu | 481 |
| | | | | Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | 588 |
| | | | | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | 478 |
| | | | | Teknik Pengelasan Kapal | 477 |
| | | | | Kelistrikan Kapal | 479 |
| | | | | Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 480 |
| | | | | Interior Kapal | 589 |
| | | 17 | Teknik Elektronika | Teknik Audio Video | 533 |
| | | | | Teknik Elektronika Industri | 534 |
| | | | | Teknik Elektronika Komunikasi | 678 |
| | | | | Teknik Mekatronika | 598 |
| | | | | Teknik Ototronik | 430 |
| | | 18 | Teknik Energi Terbarukan | Teknik Energi Hidro | 679 |
| | | | | Teknik Energi Surya dan Angin | 680 |
| | | | | Teknik Energi Biomassa | 681 |
| 2 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 | Teknik Komputer dan Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | 524 |
| | | | | Teknik Komputer dan Jaringan | 525 |

| No. | Bidang Keahlian | No | Program Keahlian | Paket Keahlian | Kode |
|----------------------|------------------------------|------------------|---|---|----------------------|
| | | 2 | Teknik Telekomunikasi | Multimedia | 526 |
| | | | | Teknik Transmisi Telekomunikasi | 599 |
| | | | | Teknik Suitsing | 517 |
| | | | | Teknik Jaringan Akses | 600 |
| | | 3 | Teknik Broadcasting | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian | 682 |
| 3 | Kesehatan | 1 | Kesehatan | Keperawatan | 575 |
| | | | | Keperawatan Gigi | 577 |
| | | | | Analisis Kesehatan | 580 |
| | | | | Farmasi | 582 |
| | | | | Farmasi Industri | 601 |
| 2 | Pekerjaan Sosial | Pekerjaan Sosial | 683 | | |
| 4 | Agribisnis dan Agroteknologi | 1 | Agribisnis Produksi Tanaman | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 553 |
| | | | | Agribisnis Tanaman Perkebunan | 558 |
| | | | | Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman | 684 |
| | | 2 | Agribisnis Produksi Ternak | Agribisnis Ternak Ruminansia | 445 |
| | | | | Agribisnis Ternak Unggas | 446 |
| | | | | Agribisnis Aneka Ternak | 610 |
| | | 3 | Kesehatan Hewan | Kesehatan Hewan | 611 |
| | | 4 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 456 |
| | | | | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 685 |
| | | | | Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan | 686 |
| | | | | 5 | Mekanisasi Pertanian |
| Teknik Tanah dan Air | 688 | | | | |

| No. | Bidang Keahlian | No | Program Keahlian | Paket Keahlian | Kode |
|-------------|------------------------|----|---|---|-----------|
| | | 6 | Kehutanan | Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan | 689 |
| | | | | Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | 690 |
| | | | | Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | 691 |
| | | | | Teknik Produksi Hasil Hutan | 692 |
| 5 | Perikanan dan Kelautan | 7 | Teknologi Penangkapan Ikan | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 511 |
| | | | | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 512 |
| | | 8 | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | Budidaya Perikanan | 693 |
| | | | | Budidaya Krustacea | 694 |
| | | | | Budidaya Kekerangan | 695 |
| | | | | Budidaya Rumput Laut | 696 |
| | | 9 | Pelayaran | Nautika Kapal Niaga | 509 |
| | | | | Teknika Kapal Niaga | 510 |
| 6 | Bisnis dan Manajemen | 1 | Administrasi | Administrasi Perkantoran | 539 |
| | | 2 | Keuangan | Akuntansi | 540 |
| | | | | Perbankan | 543 |
| | | | | Perbankan Syariah | 697 |
| | | 3 | Tata Niaga | Pemasaran | 615 |
| 7 | Pariwisata | 1 | Kepariwisataan | Usaha Perjalanan Wisata | 607 |
| | | | | Akomodasi Perhotelan | 549 |
| | | 2 | Tata Boga | Jasa Boga | 608 |
| | | | | Patiseri | 434 |
| | | 3 | Tata Kecantikan | Tata Kecantikan Rambut | 437 |
| | | | | Tata Kecantikan Kulit | 438 |
| | | 4 | Tata Busana | Tata Busana | 698 |
| | | 8 | Seni Rupa dan Kriya | 1 | Seni Rupa |
| Seni Patung | 604 | | | | |

| No. | Bidang Keahlian | No | Program Keahlian | Paket Keahlian | Kode | | |
|-----|-----------------|----|---------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | Desain Komunikasi Visual | 605 | | |
| | | | | Desain Interior | 699 | | |
| | | | | Animasi | 565 | | |
| | | 2 | Desain dan Produksi Kriya | | | Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 460 |
| | | | | | | Desain dan Produksi Kriya Kulit | 461 |
| | | | | | | Desain dan Produksi Kriya Keramik | 462 |
| | | | | | | Desain dan Produksi Kriya Logam | 463 |
| | | | | | | Desain dan Produksi Kriya Kayu | 464 |
| | | 9 | Seni Pertunjukan | 1 | Seni Musik | Seni Musik Klasik | 568 |
| | | | | | | Seni Musik Non Klasik | 569 |
| 2 | Seni Tari | | | Seni Tari | 570 | | |
| 3 | Seni Karawitan | | | Seni Karawitan | 571 | | |
| 4 | Seni Pedalangan | | | Seni Pedalangan | 572 | | |
| 5 | Seni Teater | | | | | Pemeranan | 641 |
| | | | | | | Tata Artistik | 642 |

Lampiran 3
Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kode Provinsi (Digit 3 dan 4)
Dan Kabupaten/Kota (Digit 5 dan 6)

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|-------------|---------------|----------------|----------------------------|
| DKI Jakarta | 01 | 01 | Kabupaten Kepulauan Seribu |
| | 01 | 60 | Kota Jakarta Pusat |
| | 01 | 61 | Kota Jakarta Utara |
| | 01 | 62 | Kota Jakarta Barat |
| | 01 | 63 | Kota Jakarta Selatan |
| | 01 | 64 | Kota Jakarta Timur |
| Jawa Barat | 02 | 05 | Kabupaten Bogor |
| | 02 | 06 | Kabupaten Sukabumi |
| | 02 | 07 | Kabupaten Cianjur |
| | 02 | 08 | Kabupaten Bandung |
| | 02 | 10 | Kabupaten Sumedang |
| | 02 | 11 | Kabupaten Garut |
| | 02 | 12 | Kabupaten Tasikmalaya |
| | 02 | 14 | Kabupaten Ciamis |
| | 02 | 15 | Kabupaten Kuningan |
| | 02 | 16 | Kabupaten Majalengka |
| | 02 | 17 | Kabupaten Cirebon |
| | 02 | 18 | Kabupaten Indramayu |
| | 02 | 19 | Kabupaten Subang |
| | 02 | 20 | Kabupaten Purwakarta |
| | 02 | 21 | Kabupaten Karawang |
| | 02 | 22 | Kabupaten Bekasi |
| | 02 | 23 | Kabupaten Bandung Barat |
| | 02 | 24 | Kabupaten Pangandaran |
| | 02 | 60 | Kota Bandung |
| | 02 | 61 | Kota Bogor |
| 02 | 62 | Kota Sukabumi | |
| 02 | 63 | Kota Cirebon | |
| 02 | 65 | Kota Bekasi | |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|-------------|---------------|------------------|------------------------|
| | 02 | 66 | Kota Depok |
| | 02 | 67 | Kota Cimahi |
| | 02 | 68 | Kota Tasikmalaya |
| | 02 | 69 | Kota Banjar |
| Jawa Tengah | 03 | 01 | Kabupaten Cilacap |
| | 03 | 02 | Kabupaten Banyumas |
| | 03 | 03 | Kabupaten Purbalingga |
| | 03 | 04 | Kabupaten Banjarnegara |
| | 03 | 05 | Kabupaten Kebumen |
| | 03 | 06 | Kabupaten Purworejo |
| | 03 | 07 | Kabupaten Wonosobo |
| | 03 | 08 | Kabupaten Magelang |
| | 03 | 09 | Kabupaten Boyolali |
| | 03 | 10 | Kabupaten Klaten |
| | 03 | 11 | Kabupaten Sukoharjo |
| | 03 | 12 | Kabupaten Wonogiri |
| | 03 | 13 | Kabupaten Karanganyar |
| | 03 | 14 | Kabupaten Sragen |
| | 03 | 15 | Kabupaten Grobogan |
| | 03 | 16 | Kabupaten Blora |
| | 03 | 17 | Kabupaten Rembang |
| | 03 | 18 | Kabupaten Pati |
| | 03 | 19 | Kabupaten Kudus |
| | 03 | 20 | Kabupaten Jepara |
| | 03 | 21 | Kabupaten Demak |
| | 03 | 22 | Kabupaten Semarang |
| | 03 | 23 | Kabupaten Temanggung |
| | 03 | 24 | Kabupaten Kendal |
| | 03 | 25 | Kabupaten Batang |
| | 03 | 26 | Kabupaten Pekalongan |
| | 03 | 27 | Kabupaten Pemalang |
| | 03 | 28 | Kabupaten Tegal |
| 03 | 29 | Kabupaten Brebes | |
| 03 | 60 | Kota Magelang | |
| 03 | 61 | Kota Surakarta | |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| | 03 | 62 | Kota Salatiga |
| | 03 | 63 | Kota Semarang |
| | 03 | 64 | Kota Pekalongan |
| | 03 | 65 | Kota Tegal |
| DI Yogyakarta | 04 | 01 | Kabupaten Bantul |
| | 04 | 02 | Kabupaten Sleman |
| | 04 | 03 | Kabupaten Gunung Kidul |
| | 04 | 04 | Kabupaten Kulonprogo |
| | 04 | 60 | Kota Yogyakarta |
| Jawa Timur | 05 | 01 | Kabupaten Gresik |
| | 05 | 02 | Kabupaten Sidoarjo |
| | 05 | 03 | Kabupaten Mojokerto |
| | 05 | 04 | Kabupaten Jombang |
| | 05 | 05 | Kabupaten Bojonegoro |
| | 05 | 06 | Kabupaten Tuban |
| | 05 | 07 | Kabupaten Lamongan |
| | 05 | 08 | Kabupaten Madiun |
| | 05 | 09 | Kabupaten Ngawi |
| | 05 | 10 | Kabupaten Magetan |
| | 05 | 11 | Kabupaten Ponorogo |
| | 05 | 12 | Kabupaten Pacitan |
| | 05 | 13 | Kabupaten Kediri |
| | 05 | 14 | Kabupaten Nganjuk |
| | 05 | 15 | Kabupaten Blitar |
| | 05 | 16 | Kabupaten Tulungagung |
| | 05 | 17 | Kabupaten Trenggalek |
| | 05 | 18 | Kabupaten Malang |
| | 05 | 19 | Kabupaten Pasuruan |
| | 05 | 20 | Kabupaten Probolinggo |
| | 05 | 21 | Kabupaten Lumajang |
| | 05 | 22 | Kabupaten Bondowoso |
| | 05 | 23 | Kabupaten Situbondo |
| | 05 | 24 | Kabupaten Jember |
| | 05 | 25 | Kabupaten Banyuwangi |
| | 05 | 26 | Kabupaten Pamekasan |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|----------|---------------|-------------------|---------------------------|
| | 05 | 27 | Kabupaten Sampang |
| | 05 | 28 | Kabupaten Sumenep |
| | 05 | 29 | Kabupaten Bangkalan |
| | 05 | 60 | Kota Surabaya |
| | 05 | 61 | Kota Malang |
| | 05 | 62 | Kota Madiun |
| | 05 | 63 | Kota Kediri |
| | 05 | 64 | Kota Mojokerto |
| | 05 | 65 | Kota Blitar |
| | 05 | 66 | Kota Pasuruan |
| | 05 | 67 | Kota Probolinggo |
| | 05 | 68 | Kota Batu |
| Aceh | 06 | 01 | Kabupaten Aceh Besar |
| | 06 | 02 | Kabupaten Pidie |
| | 06 | 03 | Kabupaten Aceh Utara |
| | 06 | 04 | Kabupaten Aceh Timur |
| | 06 | 05 | Kabupaten Aceh Tengah |
| | 06 | 06 | Kabupaten Aceh Barat |
| | 06 | 07 | Kabupaten Aceh Selatan |
| | 06 | 08 | Kabupaten Aceh Tenggara |
| | 06 | 11 | Kabupaten Simeulue |
| | 06 | 12 | Kabupaten Bireuen |
| | 06 | 13 | Kabupaten Aceh Singkil |
| | 06 | 14 | Kabupaten Aceh Tamiang |
| | 06 | 15 | Kabupaten Aceh Nagan Raya |
| | 06 | 16 | Kabupaten Aceh Jaya |
| | 06 | 17 | Kabupaten Aceh Barat Daya |
| | 06 | 18 | Kabupaten Gayo Lues |
| | 06 | 19 | Kabupaten Bener Meriah |
| | 06 | 20 | Kabupaten Pidie Jaya |
| | 06 | 60 | Kota Sabang |
| | 06 | 61 | Kota Banda Aceh |
| 06 | 62 | Kota Lhokseumawe | |
| 06 | 63 | Kota Langsa | |
| 06 | 64 | Kota Subulussalam | |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| Sumatera Utara | 07 | 01 | Kabupaten Deli Serdang |
| | 07 | 02 | Kabupaten Langkat |
| | 07 | 03 | Kabupaten Karo |
| | 07 | 04 | Kabupaten Simalungun |
| | 07 | 05 | Kabupaten Dairi |
| | 07 | 06 | Kabupaten Asahan |
| | 07 | 07 | Kabupaten Labuhanbatu |
| | 07 | 08 | Kabupaten Tapanuli Utara |
| | 07 | 09 | Kabupaten Tapanuli Tengah |
| | 07 | 10 | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| | 07 | 11 | Kabupaten Nias |
| | 07 | 15 | Kabupaten Mandailing Natal |
| | 07 | 16 | Kabupaten Toba Samosir |
| | 07 | 17 | Kabupaten Nias Selatan |
| | 07 | 18 | Kabupaten Pakpak Bharat |
| | 07 | 19 | Kabupaten Humbang Hasundutan |
| | 07 | 20 | Kabupaten Samosir |
| | 07 | 21 | Kabupaten Serdang Bedagai |
| | 07 | 22 | Kabupaten Batubara |
| | 07 | 23 | Kabupaten Padang Lawas |
| | 07 | 24 | Kabupaten Padang Lawas Utara |
| | 07 | 25 | Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| | 07 | 26 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| | 07 | 27 | Kabupaten Nias Barat |
| | 07 | 28 | Kabupaten Nias Utara |
| | 07 | 60 | Kota Medan |
| | 07 | 61 | Kota Binjai |
| | 07 | 62 | Kota Tebing Tinggi |
| | 07 | 63 | Kota Pematang Siantar |
| | 07 | 64 | Kota Tanjung Balai |
| 07 | 65 | Kota Sibolga | |
| 07 | 66 | Kota Padang Sidempuan | |
| 07 | 67 | Kota Gunung Sitoli | |
| Sumatera Barat | 08 | 01 | Kabupaten Agam |
| | 08 | 02 | Kabupaten Pasaman |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|----------|---------------|----------------|--------------------------------|
| | 08 | 03 | Kabupaten Lima Puluh Kota |
| | 08 | 04 | Kabupaten Solok |
| | 08 | 05 | Kabupaten Padang Pariaman |
| | 08 | 06 | Kabupaten Pesisir Selatan |
| | 08 | 07 | Kabupaten Tanah Datar |
| | 08 | 08 | Kabupaten Sijunjung |
| | 08 | 10 | Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| | 08 | 11 | Kabupaten Solok Selatan |
| | 08 | 12 | Kabupaten Dharmasraya |
| | 08 | 13 | Kabupaten Pasaman Barat |
| | 08 | 60 | Kota Bukittinggi |
| | 08 | 61 | Kota Padang |
| | 08 | 62 | Kota Padang Panjang |
| | 08 | 63 | Kota Sawahlunto |
| | 08 | 64 | Kota Solok |
| | 08 | 65 | Kota Payakumbuh |
| | 08 | 66 | Kota Pariaman |
| Riau | 09 | 01 | Kabupaten Kampar |
| | 09 | 02 | Kabupaten Bengkalis |
| | 09 | 04 | Kabupaten Indragiri Hulu |
| | 09 | 05 | Kabupaten Indragiri Hilir |
| | 09 | 08 | Kabupaten Pelalawan |
| | 09 | 09 | Kabupaten Rokan Hulu |
| | 09 | 10 | Kabupaten Rokan Hilir |
| | 09 | 11 | Kabupaten Siak |
| | 09 | 14 | Kabupaten Kuantan Singingi |
| | 09 | 15 | Kabupaten Kepulauan Meranti |
| | 09 | 60 | Kota Pekanbaru |
| | 09 | 62 | Kota Dumai |
| Jambi | 10 | 01 | Kabupaten Batanghari |
| | 10 | 02 | Kabupaten Bungo |
| | 10 | 03 | Kabupaten Sarolangun |
| | 10 | 04 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| | 10 | 05 | Kabupaten Kerinci |
| | 10 | 06 | Kabupaten Tebo |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| | 10 | 07 | Kabupaten Muaro Jambi |
| | 10 | 08 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
| | 10 | 09 | Kabupaten Merangin |
| | 10 | 60 | Kota Jambi |
| | 10 | 61 | Kota Sungai Penuh |
| Sumatera Selatan | 11 | 01 | Kabupaten Musi Banyuasin |
| | 11 | 02 | Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| | 11 | 03 | Kabupaten Ogan Komering Ulu |
| | 11 | 04 | Kabupaten Muara Enim |
| | 11 | 05 | Kabupaten Lahat |
| | 11 | 06 | Kabupaten Musi Rawas |
| | 11 | 07 | Kabupaten Banyuasin |
| | 11 | 08 | Kabupaten Oku Timur |
| | 11 | 09 | Kabupaten Oku Selatan |
| | 11 | 10 | Kabupaten Ogan Ilir |
| | 11 | 11 | Kabupaten Empat Lawang |
| | 11 | 12 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| | 11 | 13 | Kabupaten Musi Rawas utara |
| | 11 | 60 | Kota Palembang |
| | 11 | 61 | Kota Prabumulih |
| 11 | 62 | Kota Lubuk Linggau | |
| 11 | 63 | Kota Pagar Alam | |
| Lampung | 12 | 01 | Kabupaten Lampung Selatan |
| | 12 | 02 | Kabupaten Lampung Tengah |
| | 12 | 03 | Kabupaten Lampung Utara |
| | 12 | 04 | Kabupaten Lampung Barat |
| | 12 | 05 | Kabupaten Tulang Bawang |
| | 12 | 06 | Kabupaten Tanggamus |
| | 12 | 07 | Kabupaten Lampung Timur |
| | 12 | 08 | Kabupaten Way Kanan |
| | 12 | 09 | Kabupaten Pesawaran |
| | 12 | 10 | Kabupaten Mesuji |
| | 12 | 11 | Kabupaten Pringsewu |
| | 12 | 12 | Kabupaten Tulang Bawang Barat |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|--------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| | 12 | 13 | Kabupaten Pesisir Barat |
| | 12 | 60 | Kota Bandar Lampung |
| | 12 | 61 | Kota Metro |
| Kalimantan Barat | 13 | 01 | Kabupaten Sambas |
| | 13 | 03 | Kabupaten Sanggau |
| | 13 | 04 | Kabupaten Sintang |
| | 13 | 05 | Kabupaten Kapuas Hulu |
| | 13 | 06 | Kabupaten Ketapang |
| | 13 | 07 | Kabupaten Kayong Utara |
| | 13 | 08 | Kabupaten Bengkayang |
| | 13 | 09 | Kabupaten Landak |
| | 13 | 10 | Kabupaten Melawi |
| | 13 | 11 | Kabupaten Sekadau |
| | 13 | 12 | Kabupaten Kubu Raya |
| | 13 | 13 | Kabupaten Mempawah |
| | 13 | 60 | Kota Pontianak |
| | 13 | 61 | Kota Singkawang |
| Kalimantan Tengah | 14 | 01 | Kabupaten Kapuas |
| | 14 | 02 | Kabupaten Barito Selatan |
| | 14 | 03 | Kabupaten Barito Utara |
| | 14 | 04 | Kabupaten Kotawaringin Timur |
| | 14 | 05 | Kabupaten Kotawaringin Barat |
| | 14 | 06 | Kabupaten Katingan |
| | 14 | 07 | Kabupaten Seruyan |
| | 14 | 08 | Kabupaten Sukamara |
| | 14 | 09 | Kabupaten Lamandau |
| | 14 | 10 | Kabupaten Gunung Mas |
| | 14 | 11 | Kabupaten Pulang Pisau |
| | 14 | 12 | Kabupaten Murung Raya |
| | 14 | 13 | Kabupaten Barito Timur |
| | 14 | 60 | Kota Palangkaraya |
| Kalimantan Selatan | 15 | 01 | Kabupaten Banjar |
| | 15 | 02 | Kabupaten Tanah Laut |
| | 15 | 03 | Kabupaten Barito Kuala |
| | 15 | 04 | Kabupaten Tapin |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
| | 15 | 05 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| | 15 | 06 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
| | 15 | 07 | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| | 15 | 08 | Kabupaten Tabalong |
| | 15 | 09 | Kabupaten Kotabaru |
| | 15 | 10 | Kabupaten Balangan |
| | 15 | 11 | Kabupaten Tanah Bumbu |
| | 15 | 60 | Kota Banjarmasin |
| | 15 | 61 | Kota Banjarbaru |
| Kalimantan Timur | 16 | 01 | Kabupaten Paser |
| | 16 | 02 | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| | 16 | 03 | Kabupaten Berau |
| | 16 | 09 | Kabupaten Kutai Barat |
| | 16 | 10 | Kabupaten Kutai Timur |
| | 16 | 11 | Kabupaten Penajam Paser Utara |
| | 16 | 13 | Kabupaten Mahakam Ulu |
| | 16 | 60 | Kota Samarinda |
| | 16 | 61 | Kota Balikpapan |
| | 16 | 63 | Kota Bontang |
| Sulawesi Utara | 17 | 01 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| | 17 | 02 | Kabupaten Minahasa |
| | 17 | 03 | Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| | 17 | 04 | Kabupaten Kepulauan Talaud |
| | 17 | 05 | Kabupaten Minahasa Selatan |
| | 17 | 06 | Kabupaten Minahasa Utara |
| | 17 | 07 | Kabupaten Minahasa Tenggara |
| | 17 | 08 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| | 17 | 09 | Kabupaten Kepulauan Sitaro |
| | 17 | 11 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur |
| | 17 | 12 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
| | 17 | 60 | Kota Manado |
| | 17 | 61 | Kota Bitung |
| | 17 | 62 | Kota Tomohon |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|
| | 17 | 63 | Kota Kotamobagu |
| Sulawesi Tengah | 18 | 01 | Kabupaten Banggai Kepulauan |
| | 18 | 02 | Kabupaten Donggala |
| | 18 | 03 | Kabupaten Poso |
| | 18 | 04 | Kabupaten Banggai |
| | 18 | 05 | Kabupaten Buol |
| | 18 | 06 | Kabupaten Toli Toli |
| | 18 | 07 | Kabupaten Morowali |
| | 18 | 08 | Kabupaten Parigi Moutong |
| | 18 | 09 | Kabupaten Tojo Una-Una |
| | 18 | 10 | Kabupaten Sigi |
| | 18 | 11 | Kabupaten Banggai Laut |
| | 18 | 12 | Kabupaten Morowali Utara |
| | 18 | 60 | Kota Palu |
| | Sulawesi Selatan | 19 | 01 |
| 19 | | 02 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan |
| 19 | | 03 | Kabupaten Gowa |
| 19 | | 04 | Kabupaten Takalar |
| 19 | | 05 | Kabupaten Jeneponto |
| 19 | | 06 | Kabupaten Barru |
| 19 | | 07 | Kabupaten Bone |
| 19 | | 08 | Kabupaten Wajo |
| 19 | | 09 | Kabupaten Soppeng |
| 19 | | 10 | Kabupaten Bantaeng |
| 19 | | 11 | Kabupaten Bulukumba |
| 19 | | 12 | Kabupaten Sinjai |
| 19 | | 13 | Kabupaten Kepulauan Selayar |
| 19 | | 14 | Kabupaten Pinrang |
| 19 | | 15 | Kabupaten Sidenreng Rappang |
| 19 | | 16 | Kabupaten Enrekang |
| 19 | | 17 | Kabupaten Luwu |
| 19 | | 18 | Kabupaten Tana Toraja |
| 19 | | 24 | Kabupaten Luwu Utara |
| 19 | 26 | Kabupaten Luwu Timur | |
| 19 | 27 | Kabupaten Toraja Utara | |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| | 19 | 60 | Kota Makasar |
| | 19 | 61 | Kota Pare Pare |
| | 19 | 62 | Kota Palopo |
| Sulawesi Tenggara | 20 | 01 | Kabupaten Konawe |
| | 20 | 02 | Kabupaten Muna |
| | 20 | 03 | Kabupaten Buton |
| | 20 | 04 | Kabupaten Kolaka |
| | 20 | 05 | Kabupaten Konawe Selatan |
| | 20 | 06 | Kabupaten Wakatobi |
| | 20 | 07 | Kabupaten Bombana |
| | 20 | 08 | Kabupaten Kolaka Utara |
| | 20 | 09 | Kabupaten Konawe Utara |
| | 20 | 10 | Kabupaten Buton Utara |
| | 20 | 11 | Kabupaten Kolaka Timur |
| | 20 | 12 | Kabupaten Konawe Kepulauan |
| | 20 | 13 | Kabupaten Muna Barat |
| | 20 | 14 | Kabupaten Buton Selatan |
| | 20 | 15 | Kabupaten Buton Tengah |
| | 20 | 60 | Kota Kendari |
| | 20 | 61 | Kota Bau-Bau |
| | Maluku | 21 | 01 |
| 21 | | 02 | Kabupaten Maluku Tenggara |
| 21 | | 03 | Kabupaten Buru |
| 21 | | 04 | Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
| 21 | | 05 | Kabupaten Seram Bagian Barat |
| 21 | | 06 | Kabupaten Seram Bagian Timur |
| 21 | | 07 | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 21 | | 08 | Kabupaten Buru Selatan |
| 21 | | 09 | Kabupaten Maluku Barat Daya |
| 21 | | 60 | Kota Ambon |
| 21 | | 61 | Kota Tual |
| Bali | 22 | 01 | Kabupaten Buleleng |
| | 22 | 02 | Kabupaten Jembrana |
| | 22 | 03 | Kabupaten Tabanan |
| | 22 | 04 | Kabupaten Badung |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| | 22 | 05 | Kabupaten Gianyar |
| | 22 | 06 | Kabupaten Klungkung |
| | 22 | 07 | Kabupaten Bangli |
| | 22 | 08 | Kabupaten Karang Asem |
| | 22 | 60 | Kota Denpasar |
| Nusa Tenggara Barat | 23 | 01 | Kabupaten Lombok Barat |
| | 23 | 02 | Kabupaten Lombok Tengah |
| | 23 | 03 | Kabupaten Lombok Timur |
| | 23 | 04 | Kabupaten Sumbawa |
| | 23 | 05 | Kabupaten Dompu |
| | 23 | 06 | Kabupaten Bima |
| | 23 | 07 | Kabupaten Sumbawa Barat |
| | 23 | 08 | Kabupaten Lombok Utara |
| | 23 | 60 | Kota Mataram |
| Nusa Tenggara Timur | 23 | 61 | Kota Bima |
| | 24 | 01 | Kabupaten Kupang |
| | 24 | 03 | Kabupaten Timor Tengah Selatan |
| | 24 | 04 | Kabupaten Timor Tengah Utara |
| | 24 | 05 | Kabupaten Belu |
| | 24 | 06 | Kabupaten Alor |
| | 24 | 07 | Kabupaten Flores Timur |
| | 24 | 08 | Kabupaten Sikka |
| | 24 | 09 | Kabupaten Ende |
| | 24 | 10 | Kabupaten Ngada |
| | 24 | 11 | Kabupaten Manggarai |
| | 24 | 12 | Kabupaten Sumba Timur |
| | 24 | 13 | Kabupaten Sumba Barat |
| | 24 | 14 | Kabupaten Lembata |
| | 24 | 15 | Kabupaten Rote Ndao |
| | 24 | 16 | Kabupaten Manggarai Barat |
| | 24 | 17 | Kabupaten Nagekeo |
| | 24 | 18 | Kabupaten Sumba Tengah |
| | 24 | 19 | Kabupaten Sumba Barat Daya |
| | 24 | 20 | Kabupaten Manggarai Timur |
| | 24 | 21 | Kabupaten Sabu Raijua |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|----------|---------------|----------------------|------------------------------|
| | 24 | 22 | Kabupaten Malaka |
| | 24 | 60 | Kota Kupang |
| Papua | 25 | 01 | Kabupaten Jaya Pura |
| | 25 | 02 | Kabupaten Biak Numfor |
| | 25 | 03 | Kabupaten Kepulauan Yapen |
| | 25 | 07 | Kabupaten Merauke |
| | 25 | 08 | Kabupaten Jayawijaya |
| | 25 | 09 | Kabupaten Nabire |
| | 25 | 10 | Kabupaten Paniai |
| | 25 | 11 | Kabupaten Puncak Jaya |
| | 25 | 12 | Kabupaten Mimika |
| | 25 | 13 | Kabupaten Boven Digul |
| | 25 | 14 | Kabupaten Mappi |
| | 25 | 15 | Kabupaten Asmat |
| | 25 | 16 | Kabupaten Yahukimo |
| | 25 | 17 | Kabupaten Pegunungan Bintang |
| | 25 | 18 | Kabupaten Tolikara |
| | 25 | 19 | Kabupaten Sarmi |
| | 25 | 20 | Kabupaten Keerom |
| | 25 | 26 | Kabupaten Waropen |
| | 25 | 27 | Kabupaten Supiori |
| | 25 | 28 | Kabupaten Mamberamo Raya |
| | 25 | 29 | Kabupaten Mamberamo Tengah |
| | 25 | 30 | Kabupaten Nduga |
| | 25 | 31 | Kabupaten Yalimo |
| | 25 | 32 | Kabupaten Puncak |
| 25 | 33 | Kabupaten Dogiyai | |
| 25 | 34 | Kabupaten Lanny Jaya | |
| 25 | 35 | Kabupaten Deiyai | |
| 25 | 36 | Kabupaten Intan Jaya | |
| 25 | 60 | Kota Jayapura | |
| Bengkulu | 26 | 01 | Kabupaten Bengkulu Utara |
| | 26 | 02 | Kabupaten Rejang Lebong |
| | 26 | 03 | Kabupaten Bengkulu Selatan |
| | 26 | 04 | Kabupaten Muko-Muko |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|--------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| | 26 | 05 | Kabupaten Kepahiang |
| | 26 | 06 | Kabupaten Lebong |
| | 26 | 07 | Kabupaten Kaur |
| | 26 | 08 | Kabupaten Seluma |
| | 26 | 09 | Kabupaten Bengkulu Tengah |
| | 26 | 60 | Kota Bengkulu |
| Maluku Utara | 27 | 02 | Kabupaten Halmahera Tengah |
| | 27 | 03 | Kabupaten Halmahera Barat |
| | 27 | 04 | Kabupaten Halmahera Utara |
| | 27 | 05 | Kabupaten Halmahera Selatan |
| | 27 | 06 | Kabupaten Halmahera Timur |
| | 27 | 07 | Kabupaten Kepulauan Sula |
| | 27 | 08 | Kabupaten Pulau Morotai |
| | 27 | 60 | Kota Ternate |
| | 27 | 61 | Kota Tidore Kepulauan |
| Banten | 28 | 01 | Kabupaten Pandeglang |
| | 28 | 02 | Kabupaten Lebak |
| | 28 | 03 | Kabupaten Tangerang |
| | 28 | 04 | Kabupaten Serang |
| | 28 | 60 | Kota Cilegon |
| | 28 | 61 | Kota Tangerang |
| | 28 | 62 | Kota Serang |
| | 28 | 63 | Kota Tangerang Selatan |
| Babel | 29 | 01 | Kabupaten Bangka |
| | 29 | 02 | Kabupaten Belitung |
| | 29 | 03 | Kabupaten Bangka Tengah |
| | 29 | 04 | Kabupaten Bangka Barat |
| | 29 | 05 | Kabupaten Bangka Selatan |
| | 29 | 06 | Kabupaten Belitung Timur |
| | 29 | 60 | Kota Pangkal Pinang |
| Gorontalo | 30 | 01 | Kabupaten Boalemo |
| | 30 | 02 | Kabupaten Gorontalo |
| | 30 | 03 | Kabupaten Pohuwato |
| | 30 | 04 | Kabupaten Bonebolango |
| | 30 | 05 | Kabupaten Gorontalo Utara |

| Provinsi | Kode Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota |
|------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| | 30 | 60 | Kota Gorontalo |
| Kepulauan Riau | 31 | 01 | Kabupaten Bintan |
| | 31 | 02 | Kabupaten Karimun |
| | 31 | 03 | Kabupaten Natuna |
| | 31 | 04 | Kabupaten Lingga |
| | 31 | 05 | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| | 31 | 60 | Kota Batam |
| | 31 | 61 | Kota Tanjung Pinang |
| Irian Jaya Barat | 32 | 01 | Kabupaten Fak-Fak |
| | 32 | 02 | Kabupaten Sorong |
| | 32 | 03 | Kabupaten Manokwari |
| | 32 | 04 | Kabupaten Kaimana |
| | 32 | 05 | Kabupaten Sorong Selatan |
| | 32 | 06 | Kabupaten Raja Ampat |
| | 32 | 07 | Kabupaten Teluk Bintuni |
| | 32 | 08 | Kabupaten Teluk Wondama |
| | 32 | 09 | Kabupaten Tambrauw |
| | 32 | 10 | Kabupaten Maybrat |
| | 32 | 60 | Kota Sorong |
| Sulawesi Barat | 33 | 01 | Kabupaten Mamuju |
| | 33 | 02 | Kabupaten Mamuju Utara |
| | 33 | 03 | Kabupaten Polewali Mandar |
| | 33 | 04 | Kabupaten Mamasa |
| | 33 | 05 | Kabupaten Majene |
| | 33 | 06 | Kabupaten Mamuju Tengah |
| Kalimantan Utara | 34 | 01 | Kabupaten Bulungan |
| | 34 | 02 | Kabupaten Malinau |
| | 34 | 03 | Kabupaten Nunukan |
| | 34 | 04 | Kabupaten Tana Tidung |
| | 34 | 60 | Kota Tarakan |

Lampiran 4 Contoh Format A1



Formulir Pendaftaran Peserta

A1

Sertifikasi Guru Melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Nomor Peserta : 15110802711666
2. Nama Lengkap : JULAEHO S.Pd.SD
3. N U P T K : 7740736639300002
4. Bidang Studi Sertifikasi : [027] Guru Kelas SD
5. NIP : 195804081982022004
6. Golongan : IV/A
7. Masa Kerja Sebagai Guru : 31 tahun, 10 bulan
8. Jenis Kelamin : Perempuan
9. Tempat, Tgl Lahir : OKU TIMUR, 08-04-1958
10. Kualifikasi Pendidikan, Program studi: S1, PGSD
Nama Inststitusi : Universitas Terbuka
Tahun Lulus : 2010
11. Jenjang Tempat Tugas : SD
12. Mata Pelajaran / Guru Kelas : Guru Kelas
13. Masa Kerja Sebagai Pengawas :
14. Sekolah / Tempat Tugas
 - a. Nama : SDN Sukaraja
 - b. Alamat : Desa Kumpul Mulyo
 - c. Kecamatan : -
 - d. Kabupaten/Kota : Kab. Oku Timur
 - e. N P S N : 10608931

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Oku Timur

Drs. SURYA BHAKTI, MM

NIP. 195806101987011001



12041115110802711666

Lampiran 5
Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas

| No | Komponen Dokumen yang Diverifikasi | | Catatan Verifikasi | | |
|----|--|-----------|--------------------|-------|------|
| | | | Guru | Dinas | LPMP |
| 1 | Ijazah | Keabsahan | | | |
| | | Kebenaran | | | |
| | | Relevansi | | | |
| 2 | SK Mengajar | Keabsahan | | | |
| | | Kebenaran | | | |
| 3 | SK Golongan kepangkatan (PNS) atau SK Pengangkatan GTY (dari pertama hingga terakhir) | Keabsahan | | | |
| | | Kebenaran | | | |
| | | Kebenaran | | | |
| 4 | Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar | Keabsahan | | | |
| | | Kebenaran | | | |
| 5 | Surat akreditasi program studi bagi lulusan perguruan tinggi swasta | Keabsahan | | | |
| | | Kebenaran | | | |
| 6 | Surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1/DIV ketika sudah mengajar, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV | Keabsahan | | | |
| | | Kebenaran | | | |
| 7 | Surat Pernyataan dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. | Keabsahan | | | |
| | | Kebenaran | | | |
| 8 | KHUSUS PESERTA SERTIFIKASI GURU KE DUA | | | | |
| a. | SK Mutasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang; atau | Keabsahan | | | |
| | | Kebenaran | | | |

| No | Komponen Dokumen yang Diverifikasi | Catatan Verifikasi | | |
|--------------------------|--|--------------------|-------|------|
| | | Guru | Dinas | LPMP |
| | Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK dan Kewirausahaan yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain sesuai kualifikasi/latar belakang S-1/D-IV yang dimiliki; atau | Keabsahan | | |
| | | Kebenaran | | |
| | Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi guru bukan PNS yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain oleh yayasan. | Keabsahan | | |
| | | Kebenaran | | |
| b. | Foto copy sertifikat pendidik yang sudah dimiliki | Keabsahan | | |
| | | Kebenaran | | |
| 9 | Format A1 yang telah ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota | Keabsahan | | |
| | | Kebenaran | | |
| 10 | Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter | Keabsahan | | |
| | | Kebenaran | | |
| Paraf dan Tanggal | | | | |

Lampiran 6
Format Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIK :

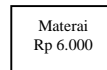
NUPTK :

Unit Kerja :

Alamat Unit Kerja :

Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti fisik di dalam berkas/dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan sertifikasi guru ini benar adanya, dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2015
Calon Peserta Sertifikasi,



(.....)
NIP/NIK

Lampiran 7 Jadwal Kegiatan

| No | Tahap dan Jenis Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan |
|----------|---|-------------------------------------|
| A | Persiapan dan Sosialisasi | |
| 1 | Publikasi Data Guru | 15 Desember 2014 |
| 2 | Sosialisasi PPGJ ke Provinsi/Kab/Kota | 9-31 Desember 2014 |
| B | Tahap Seleksi dan Penetapan Peserta | - |
| 1 | Pendataan Calon Peserta UKA | - |
| a | Penyusunan Berkas Administrasi Calon Peserta UKA | 16 Desember 2014 - 28 Februari 2015 |
| b | Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh Dinas | 22 Desember 2014 - 14 Februari 2015 |
| c | Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh LPMP | 2 Januari 2015 - 28 Februari 2015 |
| d | Menentukan lokasi TUK | 1-6 Maret 2015 |
| e | Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal | 9-14 Maret 2015 |
| 2 | Pendataan Calon Peserta PPGJ (Tidak Mengikuti UKA) | - |
| a | Penyusunan Berkas Administrasi | 16 Desember 2014 - 28 Maret 2015 |
| b | Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh Dinas | 22 Desember 2014 - 14 Maret 2015 |
| c | Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh LPMP | 2 Januari 2015 - 28 Maret 2015 |
| 3 | Publikasi Daftar Calon Peserta PPGJ Tahun 2015 | 21 Maret 2015 |
| 4 | Persetujuan Format A1 oleh LPMP | 23-24 Maret 2015 |
| a | Mencetak Format A1 oleh Dinas | 23-26 Maret 2015 |
| b | Distribusi Format A1 ke Guru | 23-26 Maret 2015 |
| C | Tahap Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen RPL | - |
| 1 | Penyiapan Dokumen RPL | 23 Maret-23 Mei 2015 |
| 2 | Mengumpulkan Dokumen RPL ke Dinas dan LPMP | April-29 Mei 2015 |
| 3 | Mengirim Dokumen RPL ke LPTK oleh LPMP | 1-10 Juni 2015 |

| No | Tahap dan Jenis Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| D | Tahap Pelaksanaan PPGJ | - |
| 1 | Penilaian RPL | Juni 2015 |
| 2 | Perbaikan Dokumen RPL (20 hari) | Juni 2015 |
| 3 | Pelaksanaan Workshop | Juli-September 2015 |
| 4 | Pelaksanaan PKM | Agustus-November 2015 |